

**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT  
PENGANGGURAN TERBUKA, DAN UPAH MINIMUM  
KABUPATEN/KOTA TERHADAP KEMISKINAN  
DI PROVINSI JAWA TIMUR  
PERIODE 2019-2023**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Fiyya Wahdatul Khusna**

**NIM 401200211**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT  
PENGANGGURAN TERBUKA, DAN UPAH MINIMUM  
KABUPATEN/KOTA TERHADAP KEMISKINAN  
DI PROVINSI JAWA TIMUR  
PERIODE 2019-2023

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Fiyya Wahdatul Khusna

NIM 401200211

Pembimbing:

Husna Ni'matul Ulya, M.E.Sy.

NIP 198608082019032023

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Khusna, Fiyya Wahdatul.** Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023. Skripsi. 2024. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Husna Ni'matul Ulya, M.E.Sy.

**Kata kunci:** Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh provinsi Jawa Timur. Jika dilihat dari persentase kemiskinan pada beberapa tahun terakhir, provinsi Jawa Timur secara stabil berada di peringkat ketiga sebagai provinsi dengan kemiskinan tertinggi di pulau Jawa. Beberapa kabupaten/kota di provinsi ini juga memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berbentuk data tahunan dari periode 2019 hingga 2023. Variabel independen yang digunakan adalah IPM, TPT, dan UMK, sedangkan variabel dependen adalah kemiskinan. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis regresi data panel yang mencakup uji asumsi klasik dan uji signifikansi dengan menggunakan software Eviews 10. Berdasarkan hasil uji, model data panel yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara TPT dan UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan, variabel IPM, TPT, dan UMK terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,993624 menunjukkan bahwa 99,36% variasi dalam kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari IPM, TPT, dan UMK, sedangkan 0,64% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fiyya Wahdatul Khusna

NIM : 401200211

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT  
PENGANGGURAN TERBUKA, DAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA  
TIMUR PERIODE 2019-2023

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian  
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 23 September 2024

Pembuat Pernyataan,



Fiyya Wahdatul Khusna

NIM 401200211

**IAIN**  
**PONOROGO**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PRNGESAHAN SKRIPSI**

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023  
Nama : Fiyya Wahdatul Khusna  
NIM : 401200211  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

**Dewan Penguji**

Ketua Sidang :  
Ridho Rokamah, M.S.I.  
NIP 197412111999032002 (.....)

Penguji I :  
Muhtadin Amri, M.S.AK.  
NIP 198907102018011001 (.....)

Penguji II :  
Husna Ni'matul Ulya, M.E.Sy.  
NIP 198608082019032023 (.....)

Ponorogo, 25 November 2024

Mengesahkan,  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo

**Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.**  
NIP 197207142000031005

**PONOROGO**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1.	Fiyya Wahdatul Khusna	401200211	Ekonomi Syariah	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 11 November 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Lunur Prasetyo, M.E.I.  
NIP 197801122006041002

Menyetujui,



Husna Ni Matul Ulya, M.E.Sy.  
NIP 198608082019032023



## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiyya Wahdatul Khusna  
NIM : 401200211  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2023.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo dan dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 18 September 2024

Penulis,



Fiyya Wahdatul Khusna

NIM 401200211



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Banyak negara di seluruh dunia, baik negara maju maupun berkembang, menghadapi kemiskinan. Ini adalah momok yang menakutkan, bahkan di negara maju. Kemiskinan adalah masalah sosial yang muncul ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan, tempat tinggal, dan pakaian, sebagai akibat dari kendala ekonomi.<sup>1</sup> Kemiskinan adalah salah satu tantangan yang umum dihadapi oleh berbagai pemerintahan di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang masih berada dalam kategori negara berkembang. Dibandingkan dengan individu di negara-negara maju, mayoritas penduduk Indonesia masih mengalami tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. Hal ini tercermin dari tingginya angka kemiskinan yang masih menjadi permasalahan di Indonesia.<sup>2</sup>

Selain itu pada saat ini persaingan global yang semakin ketat juga harus disertai dengan kesiapan untuk mengembangkan kemampuan baru dalam memproduksi barang dan layanan yang dapat bersaing secara efektif,

---

<sup>1</sup> “Lily Leonita dan Rini Kurnia Sari, Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia, Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Volume 3, Nomor 2, (2019), 88.”

<sup>2</sup> “Himawan Yudistira dkk, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado 2005-2014, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16, Nomor 2, (2019), 550.”

jika hal tersebut belum mampu dilakukan juga dapat menjadi penyebab bertambahnya angka kemiskinan. Hal ini dikarenakan layanan yang baik menjadi faktor penting bagi perusahaan, maupun UMKM untuk bertahan dalam persaingan dan berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.<sup>3</sup>

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia menghadapi tantangan kemiskinan yang harus menjadi perhatian utama. Kemiskinan merupakan agenda yang sangat penting karena secara implisit merupakan hambatan dalam mencapai Tujuan pembangunan nasional adalah untuk memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan terdistribusi secara merata di seluruh masyarakat, baik secara material maupun spiritual. Kemiskinan memiliki dampak berantai pada masalah sosial lainnya, termasuk menjamurnya pemukiman, prostitusi, jumlah anak jalanan yang kebanyakan tidak mendapatkan pendidikan, tingkat kejahatan, dan sebagainya. Karena itu, penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan dan perlu dievaluasi secara berkala guna mencapai hasil yang diinginkan.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya untuk menekan angka

---

<sup>3</sup> Shinta Maharani, Asmak Ab Rahman, Arif Dwi Septian "Customer Satisfaction and Sharia Service Quality at Surya Mart Ponorogo: Case Study from Indonesia" *European Journal of Islamic Finance*, Nomor 17, (2021), 1.

<sup>4</sup> Fadlillah N dkk, "Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2009-2013", *Jurnal Eko-Regional*, Volume 11, Nomor 2, (2019), 25."

kemiskinan di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga terlibat aktif dalam berbagai inisiatif pembangunan nasional untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Angka kemiskinan di Indonesia menjadi indikator kesejahteraan masyarakat secara umum. Tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dicapai seiring dengan menurunnya persentase kemiskinan. Akibatnya, pengurangan kemiskinan merupakan tujuan pembangunan yang memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk mengurangi prevalensinya.<sup>5</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2022 sebesar 9,54% atau 26,16 juta jiwa dari total penduduk. Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada September 2021, yang mencapai 9,71% atau sekitar 26,50 juta orang. Meskipun terjadi penurunan, perubahan tersebut tergolong relatif kecil, dengan hanya terjadi penurunan sebesar 0,17% dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>6</sup>

Angka kemiskinan di suatu provinsi tentu menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, angka kemiskinan yang tinggi di suatu provinsi dapat berdampak pada

---

<sup>5</sup> BPS, Kemiskinan Di Indonesia: Maret 2020, dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1692/persentase-penduduk-dengan-garis-kemiskinan-maret-2020-sebesar-9604persen.html>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2023, jam 16.00).”

<sup>6</sup> BPS, Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 Turun Menjadi 9,54 Persen, dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2023, jam 16.29).”

kesejahteraan sosial. Penyediaan kebutuhan dasar, termasuk pangan, sandang, dan papan, kerap menjadi tantangan bagi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini berpotensi menurunkan daya saing dan kualitas hidup provinsi tersebut, serta memengaruhi kesehatan dan pendidikan mereka.<sup>7</sup>

Pulau Jawa merupakan salah satu dari lima pulau utama di Indonesia, dan wilayah-wilayahnya memiliki perekonomian yang cukup signifikan. Di Indonesia, Pulau Jawa merupakan episentrum kegiatan ekonomi nasional, dengan banyaknya provinsi yang berperan penting bagi perekonomian negara. Perekonomian Pulau Jawa secara umum stabil, dengan perkembangan setiap tahunnya yang terus meningkat. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi setiap provinsi bergantung pada berbagai faktor, termasuk sosial ekonomi penduduknya, investasi, dan sektor-sektor utama provinsi tersebut.<sup>8</sup> Oleh karena itu, angka kemiskinan di provinsi-provinsi di Pulau Jawa juga mengalami fluktuasi. Berikut ini adalah data persentase angka kemiskinan untuk kabupaten/kota di Pulau Jawa dari tahun 2019 hingga tahun 2023:

---

<sup>7</sup> “Fitriawati dan Diniyati, Analisis Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Di Provinsi Jawa Barat., Jurnal Wacana Akuntansi, Volume 3, Nomor 1, (2020), 87.”

<sup>8</sup> “Bappenas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dalam <https://www.bappenas.go.id/id/publikasi/detail/885/rencana-pembangunan-jangk-menengah-nasional-rpjmn-2015-2019>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2023, jam 16.58).”

**Tabel 1. 1 Presentase Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa**

	2019	2020	2021	2022	2023
DKI JAKARTA	3,47	4,53	4,72	4,69	4,44
JAWA BARAT	6,91	7,88	8,4	8,06	7,62
DI YOGYAKARTA	10,8	11,41	11,79	10,93	10,77
JAWA TENGAH	11,7	12,28	12,8	11,34	11,04
JAWA TIMUR	10,37	11,09	11,4	10,38	10,35
BANTEN	5,09	5,92	6,66	6,16	6,17

Sumber: Open Data Jabar (Data diolah oleh penulis tahun 2024)

Berdasarkan data pada tabel 1.1, terdapat kenaikan dan penurunan pada masing-masing provinsi pada setiap tahunnya, dengan persentase kemiskinan paling tinggi yang terjadi pada tahun 2021. Pada gambar tersebut provinsi Jawa Timur secara stabil berada di posisi ketiga pada provinsi dengan tingkat persentase kemiskinan yang tinggi di pulau Jawa, yaitu setelah provinsi DI Yogyakarta dan provinsi Jawa Tengah.<sup>9</sup>

Tingkat persentase kemiskinan yang ada pada provinsi tersebut tentunya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial yang ada pada setiap kabupaten/kota yang berada di dalamnya. Terdapat beberapa faktor yang terkait dengan kondisi ekonomi dan sosial kabupaten/kota diantaranya

<sup>9</sup> “Open Data Jawa Barat, Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi Di Indonesia, dalam <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/persentase-penduduk-miskin-berdasarkaprovinci-di-indonesia>, (diakses pada tanggal 25 Mei 2023, jam 20.31).”

tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta penghasilan yang diperoleh masyarakat.<sup>10</sup>

Indeks Pembangunan Manusia adalah statistik yang digunakan untuk menilai kesejahteraan masyarakat. Indeks ini menilai tiga dimensi utama: kesehatan (umur panjang dan kualitas hidup), pendidikan (rata-rata dan perkiraan tahun sekolah), dan tingkat kehidupan yang memuaskan (dievaluasi berdasarkan daya beli individu). Masyarakat dengan akses yang lebih baik ke sumber daya kesehatan dan pendidikan cenderung meningkatkan kualitas hidup mereka dan memutus siklus kemiskinan, oleh karena itu Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>

Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang signifikan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini terlihat dari peningkatan alokasi dana sektor kesehatan yang mencapai posisi ketiga secara keseluruhan akibat pandemi yang menyebabkan bencana internasional. Kondisi ini

---

<sup>10</sup> “BPS, *Indonesia Social Statistics* 2020, dalam [https:// www.bps.go.id/publication/2020/12/23/9e8b9b4a1bc258b36bd74f56/statistik-indonesia-2020.html](https://www.bps.go.id/publication/2020/12/23/9e8b9b4a1bc258b36bd74f56/statistik-indonesia-2020.html), (diakses pada tanggal 25 Mei 2020, jam 21.05).”

<sup>11</sup> “Muhammad Zulfikar Yusuf, Pengaruh Pendidikan Dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 19, Nomor 1, (2022), 36.”

menunjukkan betapa pentingnya sektor kesehatan dalam mendukung pembangunan manusia di tengah situasi darurat global.<sup>12</sup>

**Tabel 1. 2 Data IPM Provinsi di Pulau Jawa**

	2022	2023
DKI JAKARTA	81,65	82,46
JAWA BARAT	73,12	73,74
JAWA TENGAH	72,79	73,39
DI YOGYAKARTA	80,64	81,07
JAWA TIMUR	72,75	73,38
BANTEN	73,32	73,87

Sumber: BPS Jawa Timur (Data diolah oleh penulis tahun 2024)

Di provinsi Jawa Timur, persentase IPM pada tahun 2023 sebesar 73,38 yang mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar 72,75, Statistik ini merupakan nilai terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa.<sup>13</sup> Keadaan ini berimplikasi pada kualitas hidup yang masih belum optimal di berbagai kabupaten dan kota, terutama ketika dihubungkan dengan angka kemiskinan yang tetap tinggi. Meskipun ada peningkatan IPM, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi kendala yang menyebabkan manfaat peningkatan IPM ini belum mampu sepenuhnya menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini

<sup>12</sup> Luhur Prasetyo, Unun Roudlotul Jannah, Nurma Fitrianna, "Corporate Governance Model of Islamic Philanthropy at Islamic Hospitals in Ponorogo" *IQTISHADIA: Journal of Islamic Economics and Business*, Volume 15, Nomor 2, (2022), 290.

<sup>13</sup> BPS, "Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi." (diakses pada tanggal 29 September 2024, jam 17.00)

menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peningkatan IPM sebagai alat pengentasan kemiskinan, yang justru menuntut kebijakan yang lebih terintegrasi antara pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.<sup>14</sup>

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator penting lainnya yang berkaitan langsung dengan perekonomian dan kemiskinan. Daerah dengan TPT tinggi cenderung menunjukkan angka kemiskinan yang lebih tinggi pula. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

**Tabel 1. 3 Persentase TPT Provinsi di Pulau Jawa tahun 2023**

	Februari	Agustus
DKI JAKARTA	7,57	6,53
JAWA BARAT	7,89	7,44
JAWA TENGAH	5,24	5,13
DI YOGYAKARTA	3,58	3,69
JAWA TIMUR	4,33	4,88
BANTEN	7,97	7,52

Sumber: BPS Jawa Timur (Data diolah oleh penulis tahun 2024)

Pada Agustus 2023, TPT Jawa Timur turun menjadi 4,88%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,32%. Penurunan TPT ini mencerminkan adanya peningkatan lapangan kerja, terutama dalam sektor-

<sup>14</sup> Nico Ayong dan Nurul Azizah, "Faktor-Faktor Yng Memengaruhi Kemiskinan Di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur." *KAPALAMADA: Jurnal Multidisipliner* Volume 1, Nomor 2, (2020), 112.

sektor formal seperti industri manufaktur dan pertanian, yang mengalami pertumbuhan dalam jumlah tenaga kerja.<sup>15</sup>

Walaupun terjadi penurunan akan tetapi angka kemiskinan masih terbilang cukup tinggi di wilayah Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur masih mencatat tingkat kemiskinan yang signifikan karena faktor ketimpangan sosial dan ekonomi yang belum teratasi sepenuhnya. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih terintegrasi dan holistik dalam menangani kemiskinan, dengan memperhatikan aspek distribusi dan akses terhadap lapangan kerja serta kualitas pekerjaan yang ditawarkan.<sup>16</sup>

Selain IPM dan TPT, salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi perekonomian suatu daerah adalah pendapatan penduduknya, yang terlihat dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diterima masyarakat. Pada tahun 2023, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur ditetapkan sebesar Rp2.040.244,30, naik 7,8% dari UMP tahun sebelumnya.<sup>17</sup>

Kenaikan Upah Minimum Provinsi ini juga tentunya berpengaruh terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota. Hal ini karena UMK ditetapkan dengan mempertimbangkan UMP sebagai acuan minimum. Jika UMP

---

<sup>15</sup> Lely Yuana, "Tingkat Pengangguran Terbuka Jatim Turun Signifikan Di Angka 4,88 Persen", dalam <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/482304/tingkat-pengangguran-terbuka-jatim-turun-signifikan-di-angka-488-persen>, (diakses pada tanggal 20 September 2024, jam 23.17).

<sup>16</sup> BPS, "Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur (Ribu Jiwa), 2022-2024", dalam <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDIxIzI=/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>, (diakses pada tanggal 20 September 2023, jam 23.40).

<sup>17</sup> Pemerintah Jawa Timur, "Keputusan Gubernur Jawa Timur", dalam <https://dokumjdih.jatimprov.go.id> (diakses pada tanggal 15 September 2024, jam 13.00).

mengalami kenaikan, daerah dengan ekonomi yang lebih baik dan biaya hidup yang lebih tinggi biasanya akan menetapkan UMK yang lebih tinggi pula, untuk mengakomodasi kebutuhan hidup tenaga kerja di sekitarnya. Dalam rangka menciptakan taraf hidup yang layak dan meningkatkan daya beli masyarakat, upah minimum dinaikkan. Meningkatnya konsumsi ini dapat mendorong munculnya berbagai usaha baru. Hal ini akan berdampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan jika berdampak pada penanggulangan kemiskinan. Gaji minimum di Provinsi Jawa Timur terus meningkat dari tahun 2001 hingga 2022. Meskipun demikian, upah minimum belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur secara merata, meskipun jumlah mereka terus meningkat. Salah satu penyebab minimnya tenaga kerja yang kompeten di bidang ini adalah kenaikan biaya Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menaikkan gaji untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja tersebut.<sup>18</sup>

Pentingnya pengawasan dan evaluasi dalam memastikan keberhasilan ekonomi dapat terlihat dalam penerapan standar yang tepat, baik dalam auditing keuangan maupun dalam pengelolaan ekonomi daerah. Penerapan ini berperan dalam mengurangi ketidakpastian dan memastikan

---

<sup>18</sup> Thalita Luqiana Putri, Ruth Eviana Hutabarat, "Analisis Pengaruh Pengangguran, Penanaman Modal dalam Negeri, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan di Jawa Timur", *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, Volume 9, Nomor 1 (2023), 68-69.

bahwa beberapa faktor seperti IPM, TPT, dan UMK dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan secara efektif.<sup>19</sup>

Banyak penelitian telah dilakukan di Indonesia untuk menyelidiki faktor-faktor penentu kemiskinan di tingkat nasional dan kabupaten/kota, dengan rentang waktu yang berbeda-beda. Contohnya adalah penelitian Rafi dan Athoillah, yang menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), upah minimum, indeks pembangunan manusia (IPM), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap kemiskinan di Kawasan Horseshoe dari tahun 2018 hingga 2020. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan TPT dapat secara substansial mengentaskan kemiskinan, tetapi TPAK, upah minimum, dan IPM dapat secara signifikan memperburuknya.<sup>20</sup>

Alhudori juga melakukan penelitian sejenis, Secara khusus menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan angka pengangguran terhadap angka kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap jumlah penduduk miskin.

---

<sup>19</sup> Shinta Maharani, Asmak Ab Rahman, dan Veni Soraya Dewi, "Learn from the Biggest Accounting Fraud in 95 Years: A Bibliometric Analysis," *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, Volume 23, Nomor 1 (2023), 20.

<sup>20</sup> "Rafi Taufik Ashari dan Moh. Athoillah, Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Tapal Kuda, *Journal Of Development Economic And Social Studies*, Volume 1, Nomor 2, (2023) 324."

Sebaliknya, PDRB memberikan pengaruh negatif yang berarti terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan angka pengangguran memberikan pengaruh positif yang berarti terhadap jumlah penduduk miskin.<sup>21</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Margaretha, Muchtolifah, dan Sishadiyanti tentang determinan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB, TPT, dan UMK memberikan pengaruh yang minimal terhadap kemiskinan, namun IPM memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan.<sup>22</sup> Merujuk beberapa penelitian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) di mana IPM, TPT, maupun upah minimum tidak selalu berdampak pada kemiskinan, namun dalam beberapa kasus dapat pula mempengaruhinya.

Berdasarkan data, teori, fenomena ekonomi, dan temuan dari penelitian sebelumnya, Penulis ingin melihat apakah fenomena yang sama terjadi jika penelitian ini dilakukan di tingkat Kabupaten atau Kota di Jawa Timur. Penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor seperti Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota, serta kaitannya dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 hingga 2023, mengingat banyaknya faktor

---

<sup>21</sup> “Alhudhori, Pengaruh IPM, PDRB, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi, *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business*, Volume 1, Nomor. 1 (2017), 122.”

<sup>22</sup> “Margaretha Larasati Prayoga, Muchtolifah, and Sishadiyanti, Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo, *Jambura Economic Education Journal*, Volume 3, Nomor 2, (2021), 141.”

yang mempengaruhi kemiskinan dan minimnya data tentang kemiskinan dan faktor-faktor penyebabnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah-masalah berikut akan dibahas dalam penelitian ini, sesuai dengan latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya:

- a. Apakah tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur dipengaruhi oleh variabel Indeks Pembangunan Manusia selama periode 2019-2023?
- b. Apakah tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur dipengaruhi oleh variabel Angka Pengangguran Terbuka selama periode 2019-2023?
- c. Apakah tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur dipengaruhi oleh variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota selama periode 2019-2023?
- d. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019-2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut, sebagai hasil dari latar belakang masalah sebelumnya:

- a. Menguji dan menganalisis dampak Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
- b. Menguji dan menganalisis dampak Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
- c. Menguji dan menganalisis dampak Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
- d. Menguji dan menganalisis dampak Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang berbagai elemen yang memengaruhi kemiskinan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian mendatang yang akan menghasilkan hasil yang lebih akurat. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi sumber daya untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan.

##### **b. Manfaat Praktis**

### 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dijadikan sebagai bagian dari bentuk penyelesaian tugas akhir untuk menyelesaikan Program Sarjana 1 yang ada di IAIN Ponorogo, serta diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait penelitian yang telah diteliti.

### 2) Bagi Akademik

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi sumber tambahan bagi mahasiswa, khususnya tentang dampak HDI, TPT dan UMK terhadap kemiskinan yang terjadi pada kabupaten/kota.

### 3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini akan menjadi referensi dan sumber informasi untuk mendukung penelitian selanjutnya, dengan cara mengambil variabel yang sama dengan periode berbeda ataupun mengambil variabel penelitian untuk dikombinasikan dengan variabel penelitian lain.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dan menyusun tesis ini sesuai dengan pokok bahasan, Tesis ini akan terdiri dari lima bab. Setiap bab akan memiliki banyak subbab yang saling terkait untuk memudahkan pembahasan yang mendalam. Urutan penulisan yang terstruktur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan konteks dan hal penting dan relevansi penelitian, yang diikuti dengan rumusan masalah yang merinci isu-isu yang akan ditangani. Selain itu, bagian ini juga menetapkan tujuan penelitian dan menjelaskan manfaat yang diharapkan, baik dari perspektif praktis maupun akademis. Secara singkat, data umum terkait penelitian kuantitatif juga akan disajikan dalam bagian latar belakang ini sebagai pendahuluan untuk penelitian.

## BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas dasar teori yang mencakup definisi dan karakteristik yang relevan dengan topik yang dibahas. Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya akan dilakukan untuk memberikan dasar bagi penelitian ini. Kerangka berpikir akan menggambarkan hubungan logis antara variabel-variabel yang terkait, baik dalam bentuk diagram maupun skema. Selain itu, hipotesis akan dirumuskan sebagai kesimpulan sementara berdasarkan dasar teori atau temuan penelitian sebelumnya, yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tujuan penelitian, durasi penelitian, dan kerangka metodologi yang digunakan untuk mencapainya. Bab ini juga membahas kategori penelitian dan metodologi yang digunakan. Bab ini menguraikan variabel yang diteliti, definisi operasionalnya, populasi dan sampel yang dipilih untuk penelitian, serta metode yang digunakan untuk pemrosesan dan analisis data.

### BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Penjelasan atau uraian umum mengenai objek penelitian, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan yang dirancang khusus untuk menjawab rumusan masalah disediakan dalam bab ini.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan yang ringkas dan tidak ambigu yang konsisten dengan tujuan dan rumusan penelitian.

Kesimpulan disusun secara sistematis, sesuai dengan urutan rumusan masalah. Selain itu, bagian kesimpulan berisi batasan-batasan yang diidentifikasi dalam penelitian ini, serta rekomendasi atau saran yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk penelitian di masa mendatang guna mengatasi potensi masalah.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Kemiskinan

##### a. Pengertian Kemiskinan

Menurut Mudrajat Kuncoro, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur yaitu (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>1</sup>

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.<sup>2</sup> Kemiskinan merujuk pada situasi di mana individu tidak mampu memenuhi

---

<sup>1</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Erlangga, 2016), 280-281.

<sup>2</sup> Husna Ni'matul Ulya, "Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional," *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Bussiness*, Volume 1, Nomor 2, (2019), 139.

kebutuhan dasar minimal yang diperlukan untuk hidup yang layak. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan seseorang berada di bawah ambang batas minimum yang telah ditetapkan, baik itu dalam hal kebutuhan makanan maupun kebutuhan non-makanan, yang disebut sebagai garis kemiskinan.<sup>3</sup>

Kemiskinan juga merujuk pada tingkat kehidupan yang rendah, di mana sejumlah individu atau kelompok mengalami kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan umum dalam masyarakat mereka. Dalam ilmu sosial, pemahaman mengenai definisi kemiskinan dicapai melalui penggunaan indikator. Indikator ini memungkinkan pengelompokan individu yang mengalami kemiskinan sebagai kelompok yang berbeda dari mereka yang tidak miskin. Dengan menggunakan indikator tersebut, dapat diketahui jumlah individu yang tergolong miskin, sehingga mereka dapat menjadi sasaran intervensi.<sup>4</sup>

#### b. Teori Kemiskinan

Teori lingkaran setan merupakan salah satu teori mengenai kemiskinan yang telah dijelaskan oleh Ragnar Nurkse bahwa

---

<sup>3</sup> BPS, “Kemiskinan Di Indonesia: Maret 2020.” dalam <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> (diakses pada tanggal 26 Mei 2023, jam 22.00)

<sup>4</sup> BPS, “Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2022,” dalam <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, (diakses pada tanggal 15 Juni 2023, jam 23.45).

lingkaran setan kemiskinan terjadi dikarenakan adanya pasar yang tidak sempurna, kurangnya permodalan, serta adanya keterbelakangan sumber daya manusia yang menyebabkan produktivitas masyarakat rendah, sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima rendah, kemudian akan berdampak pada kemiskinan karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup.<sup>5</sup>

Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitasnya dapat mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan tersebut akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan juga investasi. Rendahnya investasi tersebut berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses pada penciptaan lapangan kerja akan menjadi rendah. Hal tersebut dapat tercermin dari besar dan tingginya angka pengangguran. Rendahnya akumulasi modal berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ni Wayan Linggawati dan I Wayan Wenagama, "Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Tingkat Upah Terhadap Jumlah Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kabupaten Karangasem," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* Volume 11, Nomor 4 (2022), 405.

<sup>6</sup> Riana Puji Lestari, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015," *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017),16.

### c. Penyebab Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yang dapat diukur dengan Indeks Perkepala (*Head Count Index*), yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang tetap secara riil, sehingga kemajuan dalam mengurangi kemiskinan dapat dilacak dari waktu ke waktu. Ada beberapa penyebab kemiskinan, antara lain:<sup>7</sup>

- 1) Kemiskinan Struktural yaitu kemiskinan yang terjadi akibat dominasi kelompok atau suatu individu dalam struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ketidakmerataan yang terjadi di masyarakat, rendahnya kualitas dan kreativitas rakyat, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi faktor-faktor penyebab kemiskinan.
- 2) Kemiskinan Kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh budaya atau mentalitas kemiskinan yang dapat mengurangi usaha untuk maju. Meskipun terdapat banyak sekali program penanggulangan kemiskinan, jumlah orang miskin akan tetap tinggi karena adanya budaya miskin.

---

<sup>7</sup> Farathika Putri Utami, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh," *Jurnal Samudra Ekonomika* Volume 4, Nomor 1 (2020), 106.

#### d. Indikator Kemiskinan

Terdapat beberapa indikator yang terdapat dalam kemiskinan diantaranya yaitu sebagai berikut<sup>8</sup>:

- 1) Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.
- 2) Kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi.
- 3) Tidak memiliki jaminan untuk masa depan.
- 4) rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
- 5) Kurangnya penghargaan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- 6) Tidak memiliki akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkelanjutan.

## 2. Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990, UNDP (*United Nations Development Programme*) memperkenalkan pengukuran pertama dalam pembangunan manusia yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui laporan tahunan Human Development Report (HDR), UNDP secara teratur mempublikasikan IPM. IPM memberikan pemahaman tentang akses penduduk terhadap hasil pembangunan,

---

<sup>8</sup> Ibid., 107.

seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan aspek kehidupan lainnya.<sup>9</sup>

IPM adalah sebuah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia dengan berdasarkan beberapa komponen penting yang mempengaruhi tingkat produktivitas individu. Indeks ini dibentuk melalui tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup yang panjang dan kesehatan yang baik, tingkat pengetahuan, serta tingkat kehidupan yang layak.<sup>10</sup>

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia, dalam mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup sebagai indikator. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan, digunakan indikator angka harapan lama sekolah. Sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak, digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok, yang dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mencerminkan capaian pembangunan untuk mencapai tingkat hidup yang layak.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Adi Nugroho and Alvina Clarissa, *Indeks Pembangunan Manusia 2019* (Jakarta: Badan Pusat Statistik 2020), 11.

<sup>10</sup> Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten," *Jurnal Ekonomi-Qu* Volume 9, Nomor 1, (2019), 57.

<sup>11</sup> Adi Nugroho and Alvina Clarissa, *Indeks Pembangunan Manusia 2019* (Jakarta: Badan Pusat Statistik 2020), 12.

Menurut Napitupulu, indeks pembangunan manusia mencakup tiga dimensi utama dalam pembangunan. Dimensi tersebut terkait dengan pemenuhan kebutuhan untuk hidup lama dan sehat, perolehan pengetahuan, dan pemenuhan standar hidup yang layak. Semakin tinggi tingkat kesehatan tenaga kerja, pengetahuan yang dimiliki, dan tingkat hidup yang layak, maka hasil kerja akan menjadi lebih baik dan berkualitas. Sebaliknya, jika kondisi tenaga kerja buruk, maka hasil pekerjaan juga akan buruk atau kurang berkualitas. Ini menunjukkan bahwa ketiga dimensi penting dalam pembangunan manusia menjadi indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang siap untuk bekerja, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di suatu wilayah.<sup>12</sup>

### **3. Tingkat Pengangguran Terbuka**

#### **a. Teori Pengangguran**

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Aprilyah S. Napitulu, "Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Penduduk Miskin Di Sumatera Utara" (Universitas Sumatera Utara, 2007).

<sup>13</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 472.

Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja) dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja (*jobless*). Pengangguran dengan konsep atau definisi seperti ini biasanya disebut dengan pengangguran terbuka (*open unemployment*).<sup>14</sup>

#### **b. Klasifikasi Pengangguran**

Menurut Sadono Sukirno, pengangguran dapat dibagi menjadi empat jenis berdasarkan karakteristiknya:<sup>15</sup>

##### **1) Pengangguran Terbuka**

Pengangguran terbuka merujuk pada situasi di mana seseorang benar-benar tidak memiliki pekerjaan, meskipun telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari pekerjaan. Pengangguran jenis ini sering terjadi karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Selain itu, pengangguran terbuka juga dapat disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi,

---

<sup>14</sup> Syaifullah dan Tia Ratu Gandasari, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten," *Jurnal Ekonomi-Qu* Volume 6, Nomor 2 (2016), 244–245.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 10-11.

perkembangan teknologi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja, atau kemunduran industri tertentu.

## 2) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi terjadi ketika pekerja tidak dapat memaksimalkan potensinya dalam bekerja. Misalnya, di perusahaan kecil dengan jumlah pekerja yang terlalu banyak sehingga membuat operasional tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja di kondisi seperti ini tergolong sebagai pengangguran tersembunyi.

## 3) Setengah Menganggur

Setengah menganggur merujuk pada kondisi di mana pekerja tidak bekerja secara penuh, biasanya kurang dari 35 jam per minggu. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu atau hanya beberapa jam per hari. Pekerja yang memiliki waktu kerja terbatas seperti ini termasuk dalam kategori setengah menganggur.

## 4) Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman terjadi pada tenaga kerja yang bergantung pada musim tertentu, seperti di sektor pertanian dan perikanan. Misalnya, petani yang tidak aktif bekerja antara masa tanam dan panen. Jika mereka tidak memiliki pekerjaan

lain selama masa tersebut, mereka dianggap menganggur secara musiman.

### c. Penyebab Pengangguran

Sadono Sukirno mengklasifikasikan pengangguran berdasarkan penyebabnya menjadi tiga jenis utama<sup>16</sup>:

#### 1) Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional terjadi ketika ada hambatan sementara dalam mencocokkan pencari kerja dengan lowongan yang tersedia. Hambatan ini bisa disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan dalam proses lamaran dan seleksi kerja, atau karena faktor jarak dan kurangnya informasi mengenai lowongan yang ada.

#### 2) Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural muncul akibat perubahan dalam struktur ekonomi yang mengharuskan adanya penyesuaian keterampilan tenaga kerja. Pencari kerja yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dibutuhkan akan kehilangan pekerjaan. Sebagai contoh, ketika sebuah wilayah yang awalnya berbasis pertanian berubah menjadi kawasan industri, tenaga kerja di sektor pertanian akan mengalami pengangguran.

---

<sup>16</sup> Ibid., 8-9.

### 3) Pengangguran Konjungtural

Pengangguran konjungtural terjadi ketika jumlah pengangguran melebihi pengangguran alami dan disebabkan oleh penurunan permintaan agregat. Misalnya, saat sebuah perusahaan mengalami kemajuan, mereka mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. Namun, ketika perusahaan tersebut mengalami kerugian, PHK atau pemecatan bisa terjadi, menyebabkan pengangguran.

### 4. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah minimum diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Terdapat empat jenis upah minimum yang dibagi berdasarkan wilayah, yaitu: (a) upah minimum provinsi, (b) upah minimum kabupaten/kota, (c) upah minimum sektoral provinsi, dan (d) upah minimum sektoral kabupaten/kota. Penetapan upah minimum dilakukan oleh gubernur sebagai kepala daerah. Penetapan ini mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak serta memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak (KHL) merupakan standar yang digunakan untuk menentukan kebutuhan dasar bagi seorang pekerja lajang agar dapat hidup secara layak selama satu bulan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Moh. Faizin, "Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan Dan Pengangguran Pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* Volume 12, Nomor 1, (2021), 217.

Upah minimum merujuk pada standar kelayakan hidup bagi para pekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa upah minimum harus didasarkan pada standar KHL. Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999, mendefinisikan upah minimum sebagai “upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.” Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah yang diberikan dalam bentuk tunai harus ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk pekerja itu sendiri maupun keluarganya. Upah minimum berlaku selama 1 tahun dan merupakan upah bulanan terendah yang diterima semua jenis status buruh, yang masih lajang dan memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun dan ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) dan bupati atau walikota.<sup>18</sup>

Upah minimum kabupaten/kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi bupati atau walikota atas saran dan masukan Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota yang

---

<sup>18</sup> Izzaty and Rafika Sari, “Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2 (2019), 134.

unsurnya tripartit yaitu pengusaha, pemerintah, serikat buruh/serikat pekerja ditambah perguruan tinggi dan pakar. Penetapan upah minimum kabupaten/kota ditetapkan selambat-lambatnya empat puluh hari sebelum tanggal 1 Januari atau sesudah penetapan UMP. Upah minimum kabupaten/kota yang ditetapkan harus lebih besar dari UMP.<sup>19</sup>

## B. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi peneliti untuk membandingkan hasil penelitian yang akan dilaksanakan, dengan tujuan yaitu untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan digunakan dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian tersebut, sebuah penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Maftuh Bahrul Ilmi (2021)	Pengaruh PDRB, IPM dan TPT Terhadap Kemiskinan Di Lima	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah	Perbedaan pada artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat

<sup>19</sup> Ibid

		Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia Periode 2010-2019	sama-sama meneliti pengaruh variabel IPM dan TPT terhadap tingkat kemiskinan. Persamaan lainnya adalah sama-sama menggunakan metode analisis ekonometrika untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut.	adanya pengaruh variabel PDRB terhadap kemiskinan, serta lokasi penelitian yang akan dilakukan.	Pengangguaran Terbuka (TPT) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia periode 2010-2019. Sedangkan untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan
--	--	---	--	---	--

					n di lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia periode 2010-2019. <sup>20</sup>
2	Rr. Yuliana Intan Suryaningtyas (2021)	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di 5 Provinsi Termiskin di Indonesia Tahun 2010-2020.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti pengaruh variabel IPM dan TPT terhadap kemiskinan.	Perbedaan pada artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang akan dilakukan menggunakan hanya menggunakan dua variabel saja yaitu IPM dan TPT, serta lokasi dan tahun penelitian yang juga berbeda.	Hasil analisis data menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap Kemiskinan pada 5 Provinsi Termiskin di Indonesia. Indeks

<sup>20</sup> Maftuh Bahrul Ilmi, "Pengaruh PDRB, IPM Dan TPT Terhadap Kemiskinan Di Lima Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia Periode 2010- 2019", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 74-81.

					Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif signifikan, sedangkan Tingkat pengangguan berpengaruh positif namun tidak signifikan. <sup>21</sup>
3	Amirudin (2019)	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguan Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2014-2017 (Studi	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti pengaruh variabel IPM dan tingkat pengangguan terhadap kemiskinan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini variabel yang diteliti hanya IPM dan pengangguan saja tidak ada variabel upah minimum,	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pengangguan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan 34 provinsi di

<sup>21</sup> Rr. Yuliana Intan Suryaningtyas, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguan Terbuka Terhadap Kemiskinan Di 5 Provinsi Termiskin Di Indonesia Tahun 2010-2020.", Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 114-116.

		Kasus: 34 Provinsi)		serta pengambila n lokasi dan tahun tahun penelitian juga berbeda.	Indonesia pada tahun 2014- 2017. Variabel Indeks Pembangu nan Manusia (IPM) secara parsial memiliki pengaruh Negatif dan signifikan terhadap Kemiskina n 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2014- 2017. Variabel tingkat pengangu ran secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskina n 34 provinsi di
--	--	------------------------	--	---	---

					Indonesia pada tahun 2014-2017. <sup>22</sup>
4	Tuty Lisa Awaliyah Harahap (2020)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama merupakan jenis penelitian kuantitatif dan sama-sama meneliti pengaruh dari IPM dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan	Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat beberapa variabel lain yang akan diteliti berbeda yaitu variabel PDRB dan jumlah penduduk.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk, PDRB, IPM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Sedangkan variabel tingkat pengangguran berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap tingkat

<sup>22</sup> Amirudin, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2014-2017 (Studi Kasus: 34 Provinsi)" Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 71.

					kemiskinan di Provinsi Riau. <sup>23</sup>
5	Asrianti (2017)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan.	Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat variabel lain yang diteliti yaitu pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah terhadap kemiskinan, serta terdapat perbedaan lokasi penelitian.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sedangkan variabel belanja pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan

<sup>23</sup> Tuty Lisa Awaliyah Harahap, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Riau." Skripsi (Universitas Islam Riau, 2020), 60.

					terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. <sup>24</sup>
6	Rama Bhaskara Praja, Masruri Muchtar, Pardomuan Robinson Sihombing (2023)	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta.	Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti pengaruh IPM, dan TPT terhadap kemiskinan.	Perbedaan pada artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat variabel berbeda yang diteliti yaitu laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan, serta terdapat perbedaan lokasi penelitian.	Secara simultan, IPM, TPT, laju pertumbuhan penduduk, dan persentase penduduk miskin periode t-1 berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara parsial, TPT dan laju pertumbuhan penduduk berdampak positif dan signifikan,

<sup>24</sup> Asrianti, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." Skripsi (UIN Alauddin Makassar, 2017),73.

					sedangkan IPM dan persentase penduduk miskin periode t-1 berpengaruh positif namun tidak signifikan, menunjukkan keduanya bukan faktor utama kemiskinan. <sup>25</sup>
7	Rafi Taufik Ashari, Moh. Athoillah (2023)	Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan	Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti pengaruh dari variabel TPT, upah minimum, dan IPM	Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya variabel lain yang berbeda yaitu TPAK, Pertumbuhan Ekonomi	TPT, Pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan di Kawasan Tapal

<sup>25</sup> Rama Bhaskara Praja, dkk “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia , Laju Pertumbuhan Penduduk , Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di DKI Jakarta,” *Jurnal Ecoplan* Volume 6, Nomor 1 (2023), 84.

		Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kawasan Tapal Kuda	terhadap Kemiskinan .	dan Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan, selain itu juga terdapat perbedaan lokasi penelitian.	Kuda, sedangkan TPAK, IPM, dan upah minimum memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan di Kawasan Tapal Kuda. <sup>26</sup>
8	Encep Saefullah, Muhammad Anggad Anggriawan (2022)	Tingkat Pengangguran Terbuka Memediasi Dampak Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Kabupaten	Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti pengaruh dari TPT, IPM, dan UMK terhadap Kemiskinan .	Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya variabel lain yang ditambahkan yaitu PDRB terdapat kemiskinan serta perbedaan	Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor IPM, PDRB, UMK dan Tingkat Pengangguran Terbuka sangat mempengaruhi terhadap laju

<sup>26</sup> Ashari dan Moh. Athoillah, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Tapal Kuda." *Journal of Development Economic and Social Studies*, Volume 2, Nomor 2 (2023), 323.

		/Kota Terhadap Kemiskinan.		lokasi penelitian.	kemiskinan di suatu daerah. Prosentase kontribusi pengaruh langsung dari faktor-faktor tersebut terhadap kemiskinan dalam penelitian ini diperoleh angka sebesar 99,3%. <sup>27</sup>
9	Ari Kristin Prasetyoni	Analisis Pengaruh	Persamaan artikel ini	Perbedaan artikel ini	IPM berpengaruh

<sup>27</sup> Encep Saefullah dan Muhammad Angga Anggriawan, "Tingkat Pengangguran Terbuka Memediasi Dampak Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Kemiskinan.," *Journal Prosiding The 2nd National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET) Volume 2*, Nomor 1 (2022), 70.

	<p>ngrum, U. Sulia Sukmawati (2018)</p>	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia.</p>	<p>dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti pengaruh dari variabel IPM dan pengangguran terhadap kemiskinan.</p>	<p>dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya variabel lain yang diteliti yaitu Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan, juga terdapat perbedaan lokasi penelitian antara artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan.</p>	<p>uh negatif signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien -0,71, sementara pertumbuhan ekonomi tidak signifikan (probabilitas 0,23). Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan (koefisien 0,14, probabilitas 0,035). Selain itu, pengangguran memediasi hubungan IPM dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan</p>
--	---	---	---	---	--

					n, di mana IPM dan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan melalui pengangguran masing-masing sebesar 0,031 dan 0,037. <sup>28</sup>
10	Ahmad Syaifullah, Nazaruddin Malik (2017)	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di Asean-4.	Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah terdapat variabel sama yaitu pengaruh IPM terhadap kemiskinan.	Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah terdapat variabel lain yang berbeda yaitu pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan,	Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di ASEAN-4

<sup>28</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum and Sulia Sukmawati, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 6, Nomor. 2 (2018), 238.

				juga perbedaan lokasi penelitian.	(probabilitas 0,1149 dan t-hitung -1,617874). Sebaliknya, PDB berpengaruh negatif signifikan terhadap penurunan kemiskinan (probabilitas 0,0000 dan t-hitung -4,718732) pada periode 2005-2014. <sup>29</sup>
11	Ema Dian Ristika, Wiwin Priana Primandhana, dan Mohammad Wahed (2021)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan	Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat variabel yang sama yaitu	Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya variabel lain yang berbeda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

<sup>29</sup> Ahmad Syaifullah and Nazaruddin Malik, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Asean-4," Jurnal Ilmu Ekonomi Volume 1, Nomor 1 (2017), 117.

		Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.	pengaruh TPT dan IPM terhadap kemiskinan.	yaitu Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan.	kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan, jumlah penduduk, TPT, dan IPM berpengaruh
--	--	---	---	--	--

					terhadap kemiskinan di Jawa Timur. <sup>30</sup>
12	Febriangga Sembiring, Tarmizi, Rujiman (2020)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara	Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti variabel IPM dan TPT terhadap variabel Kemiskinan	Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini terdapat variabel lain yang berbeda yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Angkatan Kerja serta perbedaan lokasi dan tahun penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi (EG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan (POV), artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi justru menyebabkan peningkatan kemiskinan

<sup>30</sup> Ema Dian Ristika, Wiwin Priana Primandhana, dan Mohammad Wahed, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur.," Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Volume 12, Nomor 2 (2021), 136.

					<p>n. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif namun tidak signifikan, sehingga peningkatan IPM cenderung menurunkan kemiskinan meskipun dampaknya tidak kuat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan, menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran meningkat</p>
--	--	--	--	--	--

					kan kemiskinan. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. <sup>31</sup>
13	Diynta Rahmawati, Dr. Asnita Frida Sebayang (2023)	Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Ekstrem	Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti variabel IPM dan Upah Minimum terhadap variabel Kemiskinan	Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini terdapat variabel lain yang berbeda yaitu Jumlah Penduduk, serta perbedaan	Jumlah Penduduk, IPM, dan UMP secara simultan berpengaruh terhadap Kemiskinan Ekstrem sebesar 57,3877% yang dapat dijelaskan dalam persamaan

<sup>31</sup> Febriangga Sembiring, Tarmizi, dan Rujiman, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Pengangguran Terbuka Dan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara," *Jurnal Serambi Engineering* Volume 5, Nomor 2 (2020), 983.

				lokasi dan tahun penelitian.	<p>model. Sedangkan sisanya 42,6123% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam persamaan model. Adapun jika secara parsial pada masing-masing variabel maka hasilnya adalah Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Kemiskinan Ekstrem, sedangkan variabel IPM dan UMP berpengaruh negatif signifikan</p>
--	--	--	--	------------------------------	--

					terhadap Kemiskinan Ekstrem. <sup>32</sup>
14	Fanny Cantika Roseline, Emi Maimuna (2022)	Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung.	Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti pengaruh dari variabel TPT dan IPM terhadap Kemiskinan .	Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat variabel lain yang berbeda yaitu PDRB perkapita, serta terdapat perbedaan pada lokasi dan tahun penelitian yang dilakukan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Perkapita dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung 2017-2021 penelitian dan TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung 2017-

<sup>32</sup> Ddynna Rahmawati and Asnita Frida Sebayang, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan Ekstrem," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Volume 9, Nomor 2 (2023), 99..

					2021, selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa PDRB Perkapita, TPT, dan IPM memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung 2017-2021. <sup>33</sup>
15	Rizky Yulita Sutikno, Debby Ch. Rotinsulu, Steeva Y. L.	Pengaruh Upah Minimum dan Investasi Terhadap Kemiskina	Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah	Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Upah

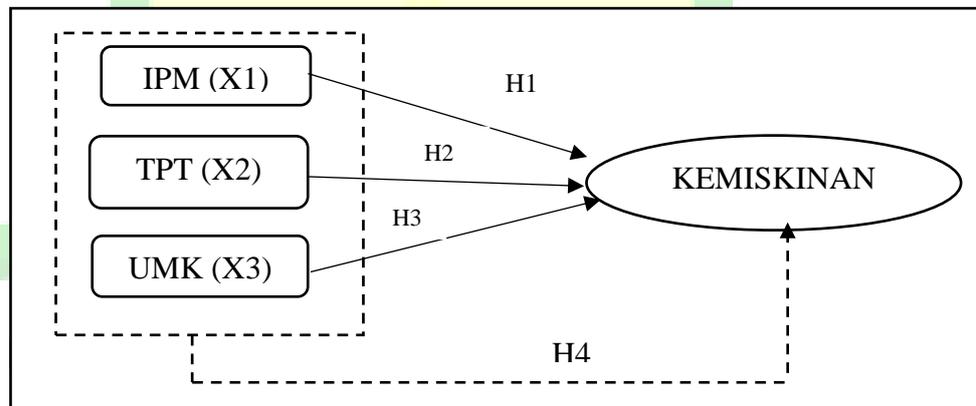
<sup>33</sup> Fanny Cantika Roseline and Emi Maimunah, "Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung.," *Cakrawala Repositori* Volume 5, Nomor 2, (2022), 237.

	Tumangkeng (2019)	n di Provinsi Sulawesi Utara.	meneliti variabel Upah Minimum terhadap Kemiskinan .	artikel ini terdapat variabel lain yang berbeda yaitu Investasi serta perbedaan pada lokasi dan tahun penelitian.	Minimum berpengaruh terhadap kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, sementara untuk variabel Investasi pemerintah masih belum memberikan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Adapun secara simultan variabel Upah Minimum dan Investasi pemerintah
--	-------------------	-------------------------------	--	---	---

					berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. <sup>34</sup>
--	--	--	--	--	---

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah pola pikir hubungan antara variabel yang akan diselidiki sekaligus menggambarkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian, teori yang digunakan, jumlah hipotesis dan teknik analisis data yang digunakan.<sup>35</sup>

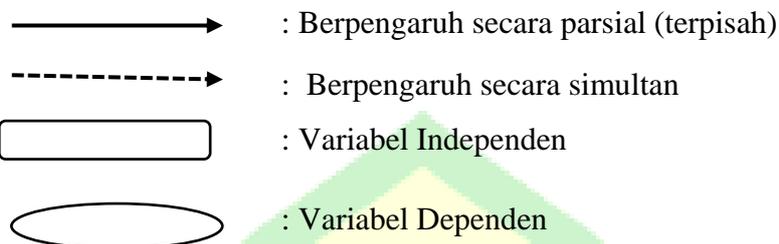


**Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran**

<sup>34</sup> Rizky Yulita Sutikno, dkk, "Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara.," Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 19, Nomor 1 (2019), 97.

<sup>35</sup> Rizky Yulita Sutikno, dkk, "Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara.," Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 19, Nomor 1 (2019), 97.

Keterangan:



Berdasarkan Gambar 2.1 maka dapat dijelaskan hubungan antara variabel independen yaitu IPM, TPT, dan UMK terhadap variabel dependen kemiskinan sebagai berikut :

a. Hubungan IPM dan kemiskinan

Menurut Arsyad, perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah. Perbaikan akses pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan gizi akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat hasil dari pembangunan sumber daya manusia adalah dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia wilayah tersebut. Semakin tinggi persentase IPM menunjukkan semakin baik pembangunan manusia di wilayah tersebut.<sup>36</sup>

Kegiatan ekonomi, yang terletak dan tertanam dalam jaringan sosial pribadi, menunjukkan pentingnya hubungan sosial dalam mendukung

<sup>36</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: STIE YKPN, 2010), 307.

keepakatan transaksi ekonomi. Hubungan sosial ini bertindak sebagai jaminan, sumber daya, media, dan katalis, yang memastikan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Partisipasi sosial yang kuat dapat menciptakan peluang solusi berbasis pasar yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks hubungan IPM terhadap kemiskinan, peningkatan kualitas hubungan sosial dan partisipasi masyarakat dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan manusia, yang pada gilirannya dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di suatu wilayah.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shinta Setya Ningrum memperoleh hasil bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.<sup>38</sup> Hasil yang sama juga diperoleh Moch. Aldino Putra G. yaitu IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.<sup>39</sup> Artinya semakin tinggi persentase IPM maka persentase kemiskinan akan semakin menurun. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang cukup erat antara IPM dan kemiskinan.

#### b. Hubungan TPT dan kemiskinan

---

<sup>37</sup> Siti Amaroh, Husnurrosyidah, Ely Masykuroh, "Financial Attitude, Trust, and ROSCAs' Member Commitment: Social Relations as Mediating Factor" *Global Business & Finance Review Journal*, Volume 28, Nomor 3 (2023), 36.

<sup>38</sup> Shinta Setya Ningrum, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 15, Nomor 2 (2017), 191.

<sup>39</sup> Moch Aldino Putra G, "Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah" Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), 70-71.

Menurut Arsyad, ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang miskin. Sementara masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah atas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan disebut dengan miskin, sedangkan seseorang yang mempunyai pekerjaan secara penuh disebut dengan kaya.<sup>40</sup>

Selain itu persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi menuntut perusahaan untuk menata ulang strategi dan sistem logistik mereka agar mampu bersaing secara efektif. Sistem logistik yang baik, cepat, dan murah menjadi penunjang daya saing perusahaan sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Dalam konteks ini, pengelolaan logistik yang efektif dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran terbuka, terutama melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor seperti transportasi, pergudangan, dan distribusi barang. Selain itu, dampaknya terhadap efisiensi rantai pasok dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah miskin, yang pada akhirnya membantu menurunkan angka kemiskinan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kinerja

---

<sup>40</sup> Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, 42.

logistik memiliki keterkaitan erat dengan dua permasalahan utama pembangunan, yakni pengangguran dan kemiskinan.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian Shinta Setya Ningrum memperoleh hasil bahwa TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.<sup>42</sup> Artinya semakin tinggi persentase TPT maka persentase kemiskinan juga semakin tinggi. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang cukup erat antara TPT dan kemiskinan.

#### c. Hubungan UMK terhadap kemiskinan

Menurut Ningrum upah merupakan sumber pemasukan, apabila sumber pemasukan turun ataupun tetap hingga kesejahteraan pula turun ataupun tetap dan itu juga pasti akan mempengaruhi tingkatan kemiskinan. Upah Minimum Kota (UMK) memiliki hubungan yang kompleks terhadap tingkat kemiskinan di suatu negara atau daerah. Hubungan ini tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat UMK itu sendiri, struktur ekonomi, dan faktor-faktor sosial serta kebijakan pemerintah terkait. Dalam beberapa kasus, peningkatan UMK dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Ketika UMK ditingkatkan, pekerja dengan upah rendah akan mendapatkan penghasilan

---

<sup>41</sup> Ahmad Sugiono dkk., "Developing Model of Logistics Capability, Supply Chain Policy on Logistics Integration and Competitive Advantage of SMEs," *Growing Science Ltd.*, Volume 11, Issue 3 (2023), 1009

<sup>42</sup> Ningrum, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 15, Nomor 1, (2017), 191.

yang lebih tinggi. Ini dapat memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, peningkatan UMK juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru.<sup>43</sup> Perusahaan yang mampu meningkatkan profitabilitas melalui investasi dan diversifikasi portofolio akan memiliki potensi untuk meningkatkan pembayaran dividen, memperluas bisnis, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Semua faktor ini dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan, terutama jika UMK yang ditetapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja.<sup>44</sup>

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis

---

<sup>43</sup> Ningrum, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 15, Nomor 1, (2017), 191.

<sup>44</sup> Miftahul Huda, Lia Noviana, dan Lukman Santoso, "Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi Di Asia Tenggara/Development The Governance of Corporate-Based Waqf In South East Asia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, Volume 12, Nomor 2 (2020): 133.

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.<sup>45</sup>

1. Hipotesis terkait pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan.

Menurut Arsyad, perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah.<sup>46</sup> Perbaikan akses pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan gizi akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Shinta Setya Ningrum memperoleh hasil bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.<sup>47</sup> Hasil yang sama juga diperoleh Moch. Aldino Putra G. yaitu IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.<sup>48</sup> Artinya semakin tinggi persentase IPM maka persentase kemiskinan akan semakin menurun.

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta), 110.

<sup>46</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, 307.

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Moch Aldino Putra G, "Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah" Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), 70-71.

H0: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan.

H1: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan.

2. Hipotesis terkait pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan.

Menurut Arsyad, ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang miskin. Sementara masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah atas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan disebut dengan miskin, sedangkan seseorang yang mempunyai pekerjaan secara penuh disebut dengan kaya.<sup>49</sup> Pada penelitian Shinta Setya Ningrum memperoleh hasil bahwa TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.<sup>50</sup> Artinya

---

<sup>49</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, hal 42.

<sup>50</sup> Ningrum, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 15, Nomor 1, (2017), 191.

semakin tinggi persentase TPT maka persentase kemiskinan juga semakin tinggi.

H0: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan.

H2: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan.

3. Hipotesis terkait pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Kemiskinan.

Menurut Siti dan Nurul upah minimum memiliki hubungan yang erat dengan kemiskinan karena Upah minimum yang akan meningkat setiap tahun dapat menawarkan gaji yang diberikan melalui suatu instansi kepada personelnya sehingga karyawan memiliki gaji/penghasilan minimum yang telah ditetapkan dengan menggunakan kewenangan setiap tahun. Hal ini untuk melindungi bagi pekerja supaya tidak terjebak dalam kemiskinan. Palsanya, anggaran gaji minimal tersebut telah disesuaikan dengan keinginan hidup yang layak yang diperlukan para pekerja.<sup>51</sup> Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila dan Yuha mengatakan bahwa upah minimum

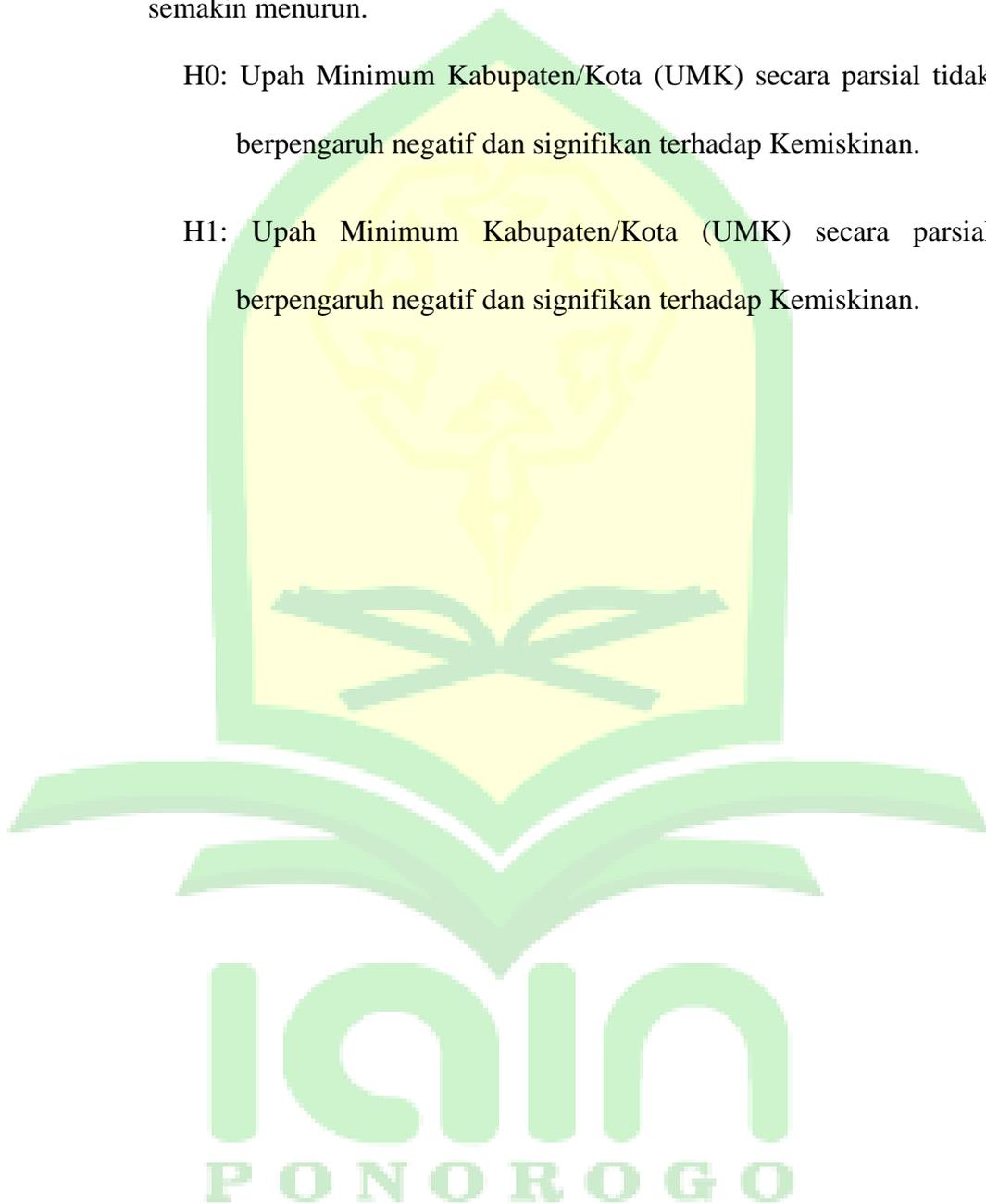
---

<sup>51</sup> Siti Hanifa dan Nurul Hanifah, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan," *INDEPENDENT: Journal of economics* Volume 1, Nomor 3 (2021), 196.

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.<sup>52</sup> Artinya semakin tinggi jumlah UMK maka persentase kemiskinan akan semakin menurun.

H0: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) secara parsial tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan.

H1: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan.



---

<sup>52</sup> Nurlaila Maysaroh Chairunnisa dan Yuha Nadhirah Qintharah, “Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020,” *Jurnal PETA* Volume 7, Nomor 1 (2022), 147–161.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan metodologis yang memadukan penalaran induktif dan deduktif, yaitu berdasarkan kerangka teori, konsep dari para ahli, atau pemahaman peneliti dari pengalaman yang dimiliki. Pemahaman ini kemudian diubah menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berusaha untuk memastikan validitas atau kesalahan suatu hipotesis dengan mengumpulkan data empiris di bidang yang relevan.<sup>1</sup>

Pendekatan kuantitatif memiliki tujuan yang beragam, seperti menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antara variabel, memberikan deskripsi statistik, serta meramalkan hasilnya. Untuk menerapkan pendekatan kuantitatif dalam penelitian, diperlukan desain penelitian yang terstruktur, baku, formal, dan telah dirancang dengan matang sebelumnya. Desain tersebut haruslah spesifik dan detail, karena desain merupakan rencana yang akan di implementasikan dalam penelitian yang sebenarnya.<sup>2</sup>

#### **B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **1. Variabel Penelitian**

---

<sup>1</sup> “Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 99.”

<sup>2</sup> “Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 10.”

Variabel penelitian mencakup semua jenis informasi yang dianggap relevan oleh peneliti, dengan tujuan mengumpulkan data dan kemudian menarik kesimpulan. Dua jenis variabel dibedakan dalam penelitian ini<sup>3</sup>:

- a. Variabel bebas (X) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan variabel terikat dan menunjukkan hubungan positif atau negatif. Penelitian ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagai variabel bebas.
- b. Variabel Terikat (Y), yang biasa disebut variabel kriteria. Variabel ini merupakan fokus utama penelitian dan tujuan utama yang ingin dipahami. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemiskinan.

## 2. Definisi Operasional

### a. Kemiskinan

Kuncoro mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup minimal yang didasarkan pada tingkat konsumsi.<sup>4</sup> Laporan Badan Pusat Statistik tentang angka kemiskinan menjadi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Rumus berikut digunakan untuk perhitungan:

---

<sup>3</sup> “Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hal 60.”

<sup>4</sup> “Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Erlangga,2016) 280-281.”

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z-y_i}{z} \right]^\alpha$$

Keterangan:

$P\alpha$  = Persentase penduduk miskin ( $\alpha = 0$ )

$Z$  = Garis kemiskinan

$Y_i$  = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$Q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$N$  = Jumlah penduduk

#### b. Indeks Pembangunan Manusia

Tiga dimensi utama atau mendasar umur panjang dan kesehatan (hidup yang panjang dan sehat), pengetahuan atau pendidikan (pengetahuan), dan tingkat hidup yang wajar digunakan oleh HDI untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan manusia.<sup>5</sup>

Statistik Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi resmi BPS dengan menggunakan metodologi terkini (dalam persentase). Rumus perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran}} \times 100$$

<sup>5</sup> “Nugroho and Clarissa, *Indeks Pembangunan Manusia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019), 11.”

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT merupakan indikator yang mengukur belum termanfaatkannya pasokan tenaga kerja dan menghitung jumlah pekerja yang belum terserap ke dalam pasar tenaga kerja. Data TPT yang digunakan dalam analisis ini meliputi statistik Tingkat Pengangguran Terbuka (dinyatakan dalam persentase) dari publikasi resmi BPS pusat. Rumus yang digunakan untuk perhitungan selanjutnya adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

c. Upah Minimum Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1999, upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang mencakup gaji pokok dan tunjangan tertentu. Dari sudut pandang ekonomi mikro, upah dirancang untuk berfungsi sebagai pengaman terhadap pemotongan upah. Namun, dalam skala yang lebih besar, upah minimum bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan daya beli pekerja, dan menyeimbangkan persaingan pendapatan. Ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi besar kecilnya upah seperti permintaan penawaran TK.,

<sup>6</sup> “Berita Resmi Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019, dalam <https://www.bps.go.id/id/publication/2019/11/29/96138ece33ccc220007acbdd/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2019.html>, (diakses pada tanggal 5 November 2023, jam 15.00).”

organisasi buruh, kemampuan bayar perusahaan, produktivitas, biaya hidup, pemerintah, keadilan dan kelayakan upah.<sup>7</sup> Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan contoh penerapan aturan upah minimum di Indonesia. Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).<sup>8</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Data yang disajikan meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Data yang dicakup dalam penelitian ini meliputi tahun 2019 hingga 2023.

### **D. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah kategori luas yang terdiri dari entitas atau individu dengan fitur dan atribut tertentu. Populasi dipilih sebagai fokus

---

<sup>7</sup> “Wayan Gde Wiryawan, *Ironi Upah Minimum Dalam Industri Pariwisata*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 125-128.”

<sup>8</sup> “Ali Mauludi, Fadllan, dan Fitri Nur Rahmawati, Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2017 - 2021, *Iqtishadia : Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* Volume 10, Nomor 1 (2023), 70.”

penelitian oleh peneliti untuk menelitinya dan kemudian membuat temuan.<sup>9</sup> Seluruh data Indeks Pembangunan Manusia, TPT, UMK, dan kemiskinan tahun 2019–2023 di kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi populasi penelitian.

**Tabel 3. 1 Data Populasi**

No.	Nama Kabupaten	Data		
		IPM	TPT	UMK
1.	Kabupaten Pacitan	5	5	5
2.	Kabupaten Ponorogo	5	5	5
3.	Kabupaten Trenggalek	5	5	5
4.	Kabupaten Tulungagung	5	5	5
5.	Kabupaten Blitar	5	5	5
6.	Kabupaten Kediri	5	5	5
7.	Kabupaten Malang	5	5	5
8.	Kabupaten Lumajang	5	5	5
9.	Kabupaten Jember	5	5	5
10.	Kabupaten Banyuwangi	5	5	5
11.	Kabupaten Bondowoso	5	5	5

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 80.

12.	Kabupaten Situbondo	5	5	5
13.	Kabupaten Probolinggo	5	5	5
14.	Kabupaten Pasuruan	5	5	5
15.	Kabupaten Sidoarjo	5	5	5
16.	Kabupaten Mojokerto	5	5	5
17.	Kabupaten Jombang	5	5	5
18.	Kabupaten Nganjuk	5	5	5
19.	Kabupaten Madiun	5	5	5
20.	Kabupaten Magetan	5	5	5
21.	Kabupaten Ngawi	5	5	5
22.	Kabupaten Bojonegoro	5	5	5
23.	Kabupaten Tuban	5	5	5
24.	Kabupaten Lamongan	5	5	5
25.	Kabupaten Gresik	5	5	5
26.	Kabupaten Bangkalan	5	5	5
27.	Kabupaten Sampang	5	5	5
28.	Kabupaten Pamekasan	5	5	5

29.	Kabupaten Sumenep	5	5	5
30.	Kota Kediri	5	5	5
31.	Kota Blitar	5	5	5
32.	Kota Malang	5	5	5
33.	Kota Probolinggo	5	5	5
34.	Kota Pasuruan	5	5	5
35.	Kota Mojokerto	5	5	5
36.	Kota Madiun	5	5	5
37.	Kota Surabaya	5	5	5
38.	Kota Batu	5	5	5
Jumlah Data		190	190	190

Sumber: bps.go.id (Data diolah oleh penulis tahun 2024)

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mencerminkan keseluruhan karena ukuran dan atributnya. Karena keterbatasan waktu, uang, dan tenaga, peneliti menggunakan sampel. Akibatnya, sampel yang dipilih harus merupakan gambaran umum dari

populasi. Kesimpulan yang dihasilkan dari sampel ini nantinya akan digeneralisasikan sebagai kesimpulan bagi keseluruhan populasi.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, setiap komponen atau anggota populasi memiliki probabilitas pemilihan yang berbeda karena penggunaan pendekatan pengambilan sampel non-probabilitas.<sup>11</sup> Dari tahun 2019 hingga 2023, proyek ini akan mengumpulkan 190 sampel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Sebagai referensi teoritis untuk penelitian ini, materi sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, terbitan berkala, makalah pemerintah, laporan keuangan perusahaan, catatan, dan artikel.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan data panel, yang menggabungkan data *cross-sectional* dan *time series* sebagai datasetnya.<sup>13</sup> Data *time series* digunakan untuk menganalisis variasi selama rentang waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Di Provinsi Jawa Timur, variabel dianalisis di seluruh kabupaten dan kota dengan menggunakan data lintas sektoral. Selama periode lima tahun dari tahun 2019 hingga 2023, Badan Pusat

---

<sup>10</sup> “Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 81.”

<sup>11</sup> Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), 87.

<sup>12</sup> Ibid, 89.

<sup>13</sup> Setiawan and Dwi Endah Kusriani, *Ekonometrika* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 180.

Statistik (BPS) menyediakan data yang diperlukan untuk penelitian ini, yang dikumpulkan dari setiap kabupaten dan kota.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk pengumpulan data guna mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang memberikan deskripsi, penjelasan, dan pandangan tentang fenomena yang relevan dengan topik penelitian.<sup>14</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, data tersebut akan disintesis melalui penerapan teknik pengolahan data dengan menggunakan rumus atau pendekatan tertentu.

#### **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Proses menganalisis data yang dikumpulkan menggunakan teknik statistik untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang ditentukan dikenal sebagai analisis data.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier multivariat untuk menilai hubungan atau pengaruh antara variabel independen dan dependen. Penelitian ini menggunakan data panel, yang mengintegrasikan data *cross-sectional* dan *time series*.<sup>16</sup> Rumus regresi data panel sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> “Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 89.”

<sup>15</sup> “Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 240.”

<sup>16</sup> “Setiawan and Dwi Endah Kusri, *Ekonometrika*, 180.”

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Kemiskinan (persen)  
 $\beta_0$  : Konstanta/Intercept  
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien Regresi Parsial  
 $X_1$  : Indeks Pembangunan Manusia (persen)  
 $X_2$  : Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)  
 $X_3$  : Upah Minimum Kabupaten Kota (rupiah)  
e : Error

Pada tingkat signifikansi 5%, uji t dan uji F digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan alat analisis berikut:

**a. Estimasi Model Regresi Data Panel**

**1) *Common Effect Model* (CEM)**

*Common Effect Model* Model ini termasuk yang paling mendasar karena memadukan data lintas bagian dan data deret waktu tanpa memperhitungkan variasi dari waktu ke waktu atau antar model. Karena dimensi orang dan waktu tidak diberi pertimbangan khusus dalam metode ini, perilaku data dianggap konsisten di semua periode waktu. Metode *Ordinary Least*

P O N O R O G O

*Squares* (OLS) digunakan untuk memperkirakan model data panel ini.<sup>17</sup>

## 2) *Fixed Effect Model (FEM)*

*Fixed Effect Model* Ini adalah model yang mengasumsikan intersepsi yang berbeda. Estimasi data panel menggunakan variabel dummy untuk merepresentasikan variasi dalam intersepsi. Konsep Efek Tetap bergantung pada fluktuasi temporal intersepsi. Model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi, atau kemiringan, tetap konstan sepanjang waktu dan di antara perusahaan. Variabel *Dummy* Kuadrat Terkecil atau (LSDV) adalah teknik yang menggunakan variabel dummy untuk mengatasi variasi dalam intersepsi.<sup>18</sup>

## 3) *Random Effect Model (REM)*

Model Efek Tetap menggunakan variabel-variabel tiruan untuk mengurangi ambiguitas tentang model yang sebenarnya. Namun pada akhirnya, hal ini mengakibatkan penurunan efisiensi parameter karena menurunkan derajat kebebasan. Model Efek Acak, yang menggunakan variabel-variabel gangguan, dapat

---

<sup>17</sup> “Maftuh Bahrul Ilmi, Pengaruh PDRB, IPM Dan TPT Terhadap Kemiskinan Di Lima Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia Periode 2010- 2019, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 48-49.”

<sup>18</sup> “Maftuh Bahrul Ilmi, Pengaruh PDRB, IPM Dan TPT Terhadap Kemiskinan Di Lima Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia Periode 2010- 2019, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 49.”

mengatasi masalah ini. Data panel diestimasi menggunakan model ini dengan anggapan bahwa faktor-faktor gangguan dapat dikaitkan satu sama lain dari waktu ke waktu dan di antara orang-orang. *Generalized Least Squares* (GLS) adalah teknik terbaik untuk memperkirakan Model Efek Acak. yang memungkinkan estimasi yang lebih efisien ketika ada korelasi antar variabel gangguan.<sup>19</sup>

#### **b. Penentu Model Estimasi**

Sebelum memulai penyelidikan, banyak pengujian harus dilakukan untuk mengidentifikasi model estimasi yang optimal. Pengujian berikut dapat dilakukan, khususnya:

##### **1) Uji Chow**

Saat memperkirakan data panel, uji Chow digunakan untuk mengidentifikasi model Efek Umum atau Efek Tetap terbaik.

Hipotesis uji Chow adalah:

H0 : Pilih model OLS gabungan atau Model Efek Umum jika nilai probabilitas statistik-F kurang dari 5%.

H1 : Jika nilai probabilitas statistik-F signifikan pada  $\alpha$  5%, maka Model Efek Tetap akan dipilih.

---

<sup>19</sup> Maftuh Bahrul Ilmi, "Pengaruh PDRB, IPM Dan TPT Terhadap Kemiskinan Di Lima Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia Periode 2010- 2019", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 49-50.

Dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel, hipotesis yang disebutkan di atas ditolak.  $H_0$  ditolak jika angka F-hitung lebih besar ( $>$ ) dari F-tabel, yang menunjukkan bahwa Fixed Effect Model adalah model yang paling sesuai. Di sisi lain,  $H_0$  diterima jika F-hitung lebih kecil dari F-tabel ( $<$ ), yang menunjukkan bahwa Common Effect Model adalah model yang digunakan. Pengujian ini membantu menentukan model yang paling tepat berdasarkan perbandingan statistik yang terukur, memastikan bahwa pemilihan model didasarkan pada data yang relevan dan akurat.<sup>20</sup>

## 2) Uji Hausman

Uji Hausman adalah teknik statistik yang digunakan untuk menilai kesesuaian model Efek Tetap atau Efek Acak. Hipotesis berikut digunakan untuk melakukan pengujian ini:

$H_0$  : Jika nilai Chi-square kurang dari 5%, gunakan model Efek Acak.

$H_1$  : Jika nilai Chi-square signifikan pada  $\alpha$  5%, gunakan model Efek Tetap.

Dengan  $n$  derajat kebebasan, statistik Uji Hausman didasarkan pada distribusi Chi-square, di mana  $n$  adalah jumlah variabel independen.  $H_0$  ditolak jika nilai statistik Hausman

---

<sup>20</sup> Ibid., 50.

melebihi nilai kritis, yang menunjukkan bahwa model Efek Tetap adalah yang paling sesuai. Di sisi lain, Efek Acak adalah model yang tepat jika nilai statistik Hausman kurang dari nilai krusial.<sup>21</sup>

### 3) Uji LM (*Langrange Multiplier*)

Breusch-Pagan membuat Uji Pengganda Langrange (uji LM) untuk menilai apakah model Efek Acak lebih cocok daripada model Efek Umum. Setelah uji Chow menunjukkan bahwa model yang dipilih adalah model Efek Umum, relevansi model Efek Acak diperiksa menggunakan uji Breusch-Pagan. Aturan berikut digunakan saat mengekstrapolasi hasil dari uji Pengganda Langrange<sup>22</sup>:

- a) Model Efek Acak ditolak jika nilai statistik LM lebih besar dari nilai Chi-Square.
- b) Model Efek Umum disetujui jika nilai statistik LM lebih kecil dari nilai Chi-Square

#### c. Uji Asumsi Klasik

##### 1) Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk memastikan apakah residual terstandar dari model regresi mengikuti distribusi

---

<sup>21</sup> Maftuh Bahrul Ilmi, "Pengaruh PDRB, IPM Dan TPT Terhadap Kemiskinan Di Lima Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia Periode 2010- 2019", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 51.

<sup>22</sup> Ibid., 51-52.

normal. Nilai yang tinggi dalam data yang dianalisis atau kurangnya distribusi normal adalah dua penyebab utama anomali. Nilai pembacaan yang tinggi dapat disebabkan oleh kesalahan pengambilan sampel, kesalahan entri data, atau penyimpangan karakteristik data yang cukup besar dari norma. Ghozali menyatakan bahwa dalam uji normalitas,  $H_0$  diterima, yang menunjukkan bahwa data terdistribusi normal ketika nilai probabilitas signifikansi melebihi 0,05. Sebaliknya,  $H_0$  ditolak jika nilai probabilitas signifikansi di bawah 0,05, yang menandakan bahwa data tidak terdistribusi normal.<sup>23</sup>

## 2) Uji *Multikolinieritas*

Uji multikolinieritas bertujuan untuk memastikan apakah variabel independen dalam model regresi menunjukkan korelasi. Korelasi di antara variabel independen menyiratkan tidak adanya ortogonalitas, itulah sebabnya regresi yang tepat tidak boleh menampilkan hubungan tersebut. Ketika korelasi antara variabel independen adalah nol, maka dikatakan ortogonal. Nilai-P yang lebih besar dari 0,8, yang menunjukkan hubungan signifikan antara variabel independen, dapat menunjukkan

---

<sup>23</sup> “Fikri Choirunnisa, *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 52-53.”

multikolinearitas, yang dapat membahayakan keakuratan model regresi.<sup>24</sup>

### 3) Uji *Heteroskedastisitas*

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memastikan apakah varians residual regresi berfluktuasi di seluruh pengamatan. Homoskedastisitas mengacu pada keadaan di mana variasi residual di antara pengamatan konsisten atau seragam. Homoskedastisitas merupakan atribut yang baik karena menunjukkan keseragaman varians. Peneliti menggunakan uji Park untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Uji Park secara teoritis dilakukan dengan meregresikan residual kuadrat pada variabel independen model.<sup>25</sup>, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau t-statistik lebih besar dari t-tabel, maka terjadi heteroskedastisitas.
- b) Tidak adanya heteroskedastisitas diindikasikan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 atau t-statistik lebih kecil dari t-tabel.

### 4) Uji *Autokorelasi*

---

<sup>24</sup> “Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), 103.”

<sup>25</sup> “Riana Puji Lestari, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015*, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 52.”

*Autokorelasi* digunakan untuk menggambarkan keberadaan hubungan atau korelasi antara dua pengamatan yang dilakukan pada waktu terpisah.<sup>26</sup> Masalah autokorelasi dapat ditemukan dengan menggunakan berbagai teknik. Metode Durbin-Watson umumnya digunakan dalam pengujian ekonometrik. Uji statistik *d* merupakan penilaian statistik yang dirancang oleh Durbin-Watson. Nilai penting dari batas bawah (*dL*) dan batas atas (*dU*) secara efektif dipastikan oleh Durbin-Watson dengan menggunakan pendekatan ini. Jika nilai *d* yang dihitung berada di luar rentang nilai penting, autokorelasi, baik positif maupun negatif, tampak jelas. Tabel berikut dapat digunakan untuk menentukan keberadaan autokorelasi<sup>27</sup>:

**Tabel 3. 2 Uji Statistik *Durbin-Watson d***

Nilai Statistik <i>d</i>	Hasil
$0 < d < dL$	Terjadi <i>autokorelasi</i> positif
$dL < d < dU$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$dU < d < 4-dU$	Tidak terjadi <i>autokorelasi</i>
$4-dU < d < 4-dL$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$4-dL < d < 4$	Terjadi <i>autokorelasi</i> negatif

<sup>26</sup> “Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), 137.”

<sup>27</sup> “Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), 141-142.”

#### d. Uji Statistik

##### 1) Uji F

Uji F dimaksudkan untuk mengevaluasi secara statistik dampak simultan Upah Minimum Kabupaten/Kota (X3), Tingkat Pengangguran Terbuka (X2), dan Indeks Pembangunan Manusia (X1) terhadap variabel dependen, kemiskinan (Y). Pada tingkat signifikansi 5%, uji F bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen ini secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen.<sup>28</sup> Berikut ini adalah kriteria pengujiannya:

Hipotesis diterima apabila nilai F estimasi lebih kecil dari nilai F tabel, hal ini menunjukkan variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

- a) Hipotesis ditolak apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, yang berarti semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat signifikansi 0,05.
- b) Hipotesis diterima apabila nilai F hitung lebih kecil dari nilai F kritis, yang berarti faktor-faktor bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

---

<sup>28</sup> “Imam Gunawan, *Pengantar Statistika Inferensial I, II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 104.”

## 2) Uji t

Uji t digunakan untuk memastikan dampak signifikan setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen secara efektif.<sup>29</sup> Teori-teori berikut dapat diterapkan untuk menyelidiki bagaimana faktor-faktor independen mempengaruhi variabel-variabel dependen:

- a) Hipotesis 0: Variabel dependen kemiskinan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independen IPM, TPT, atau UMK.
- b) Hipotesis 1: Variabel dependen kemiskinan dipengaruhi secara signifikan oleh masing-masing variabel independen IPM, TPT, dan UMK.

Berikut adalah kriteria pengujiannya:

- a)  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima apabila nilai probabilitas t hitung lebih kecil dari  $\alpha$  ( $\alpha = 0,05$ ). Faktor IPM, TPT, dan UMK berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan.

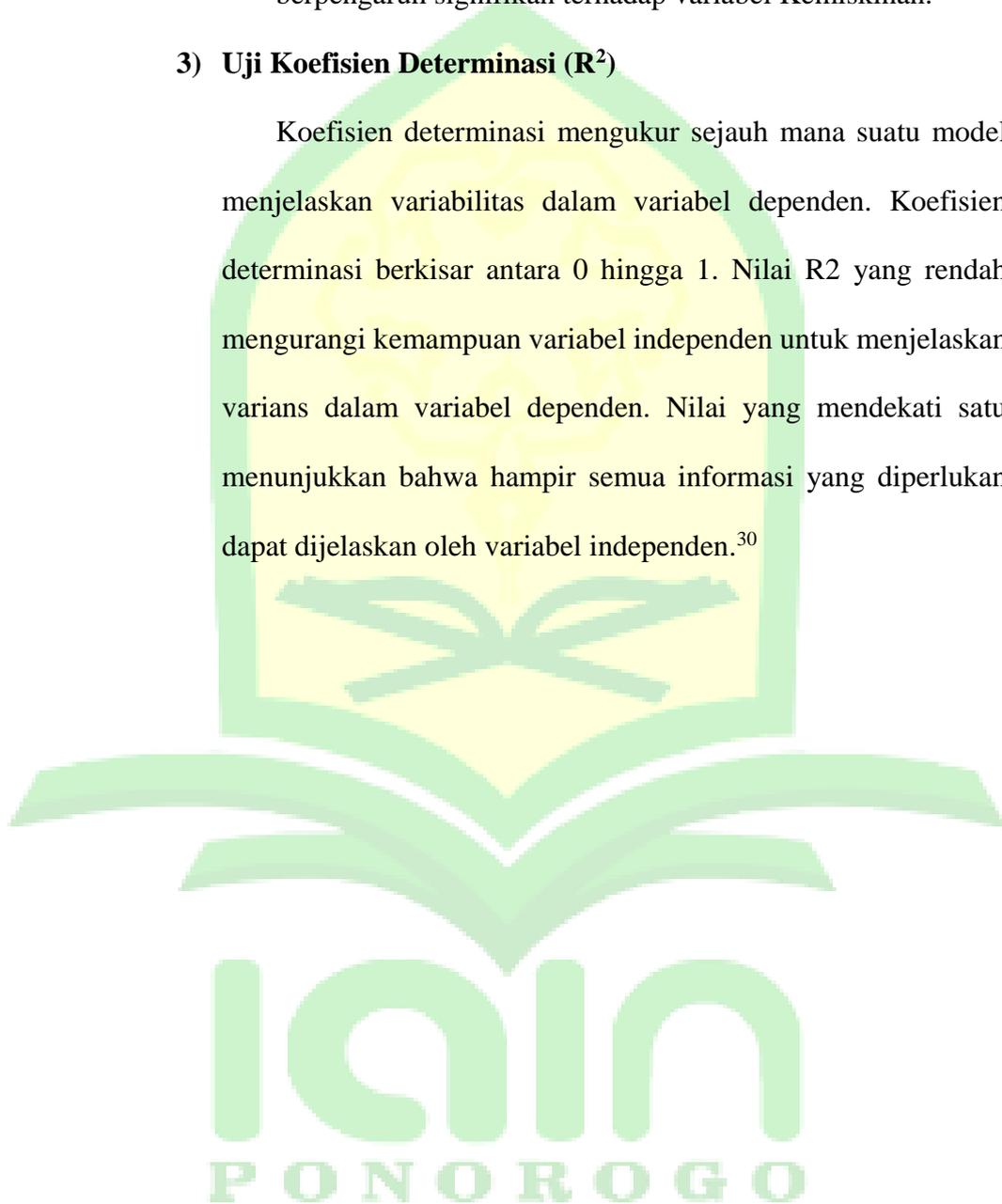
---

<sup>29</sup> “Imam Gunawan, *Pengantar Statistika Inferensial I, II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 104.”

b)  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak apabila nilai probabilitas  $t$  hitung melebihi  $\alpha$  ( $\alpha = 0,05$ ). Faktor IPM, TPT, dan UMK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan.

### 3) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi mengukur sejauh mana suatu model menjelaskan variabilitas dalam variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Nilai  $R^2$  yang rendah mengurangi kemampuan variabel independen untuk menjelaskan varians dalam variabel dependen. Nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa hampir semua informasi yang diperlukan dapat dijelaskan oleh variabel independen.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, 15.

## BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan data panel, yang menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Data *time series* mencakup periode antara 2019 hingga 2023, sedangkan data *cross section* diambil dari kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta variabel dependen yang berupa persentase kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Timur. Untuk pengolahan dan analisis data, digunakan *software Eviews 10* dengan pendekatan ekonometrik.

### B. Hasil Pengujian Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan berbagai karakteristik data yang diperoleh dari sampel. Statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), nilai maksimum, nilai minimum, dan *standar deviasi*. Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif dari data yang diuji:

**Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	<b>Kemiskinan</b>	<b>IPM</b>	<b>TPT</b>	<b>UMK</b>
<b><i>Mean</i></b>	10.65163	72.48642	4.946737	2476127.
<b><i>Median</i></b>	10.02500	71.91000	4.745000	2155887.
<b><i>Maximum</i></b>	23.76000	83.45000	10.97000	4525479.

<b>Minimum</b>	3.310000	61.94000	0.910000	1763268.
<b>Std. Dev.</b>	4.413940	5.077695	1.831370	772831.8
<b>Observations</b>	190	190	190	190

Sumber: Eviews 10 (Data diolah oleh penulis tahun 2024)

Berdasarkan Tabel 4.1 uji statistik deskriptif di atas, diketahui bahwa data atau n yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 190 data dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Kemiskinan

Persentase kemiskinan pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019-2023 menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) nilai kemiskinan adalah sebesar 10,65163 atau 10,65%, dengan *standar deviasi* sebesar 4,41%. Adapun persentase kemiskinan tertinggi (maksimum) tercatat sebesar 23,76000 atau 23,76% dari jumlah penduduk, yang terjadi di Kabupaten Sampang pada tahun 2021. Sementara itu, persentase kemiskinan terendah (minimum) adalah 3,310000 atau 3,31% dari jumlah penduduk, yang tercatat di Kota Batu pada tahun 2023.

### 2. IPM

Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019-2023 menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) IPM adalah sebesar 72,48642 atau 72,48%, dengan *standar deviasi* sebesar 5,08%. Adapun

persentase IPM tertinggi (maksimum) tercatat sebesar 83,45000 atau 83,45%, yang terjadi di Kota Surabaya pada tahun 2023. Sementara itu, persentase IPM terendah (minimum) adalah 61,94000 atau 61,94%, yang tercatat di Kabupaten Sampang pada tahun 2019.

### 3. TPT

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019-2023 menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) TPT adalah 4,946737 atau 4,94%, dengan *standar deviasi* sebesar 1,83%. Persentase TPT tertinggi (maksimum) tercatat sebesar 10,97000 atau 10,97%, yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020. Sementara itu, persentase TPT terendah (minimum) adalah 0,910000 atau 0,91%, yang tercatat di Kabupaten Pacitan pada tahun 2019.

### 4. UMK

Dari besaran jumlah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Timur periode 2019-2023 menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) UMK adalah sebesar 2.476.127 rupiah dengan nilai standar deviasi sebesar 772.831,8 rupiah. Sedangkan nilai UMK tertinggi (maksimum) sebesar 4.525.479 rupiah, nilai tersebut terjadi di kota Surabaya pada tahun 2023 dan nilai UMK terendah (minimum) sebesar 1.763.268 rupiah, nilai tersebut terjadi di kabupaten Pacitan pada tahun 2019.

## C. Hasil Pengujian Hipotesis

### 1. Estimasi Model Regresi Data Panel

Ada tiga pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Berikut ini disajikan hasil regresi yang menggunakan ketiga metode estimasi data panel tersebut:

**Tabel 4. 2 Hasil Uji Regresi Data Panel dengan Tiga Model**

Variabel		Metode Estimasi		
		CEM	FEM	REM
C	<i>Coefficient</i>	61.76946	51.66684	51.58860
	<i>Std. Error</i>	3.076390	4.977185	3.834983
	<i>t-statistic</i>	20.07855	10.38073	13.45211
	<i>Prob.</i>	0.0000	0.0000	0.0000
IPM	<i>Coefficient</i>	-0.711535	-0.655784	-0.642715
	<i>Std. Error</i>	0.047571	0.080014	0.060635
	<i>t-statistic</i>	-14.95720	-8.195862	-10.59978
	<i>Prob.</i>	0.0000	0.0000	0.0000
TPT	<i>Coefficient</i>	0.069079	0.116253	0.123011
	<i>Std. Error</i>	0.140659	0.033982	0.032422
	<i>t-statistic</i>	0.491107	3.421040	3.794096
	<i>Prob.</i>	0.623	0.0008	0.0002

UMK	<i>Coefficient</i>	4.73E-08	2.40E-06	2.04E-06
	<i>Std. Error</i>	3.04E-07	4.29E-07	3.37E-07
	<i>t-statistic</i>	0.155508	5.599410	6.048504
	<i>Prob.</i>	0.8766	0.0000	0.0000
<i>-squared</i>		0.638381	0.992788	0.444587
<i>adjusted R-squared</i>		0.632549	0.990852	0.435629
<i>-statistic</i>		109.4512	512.7802	49.62860
<i>rob(F-statistic)</i>		0.000000	0.000000	0.000000
<i>urbin-Watson stat</i>		0.064663	2.089784	0.029361

Sumber: *Eviews 10* (Data diolah oleh penulis tahun 2024)

## 2. Penentu Model Estimasi

Ada tiga jenis pengujian yang perlu dilakukan untuk menentukan model estimasi yang paling tepat dan sesuai dalam mengelola data panel. Ketiga pengujian tersebut meliputi uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *LM* (*Lagrange Multiplier*). Uji *Chow* bertujuan untuk membandingkan model regresi yang menggunakan efek tetap dengan model yang menggunakan efek biasa. Uji *Hausman* digunakan untuk menentukan apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang lebih tepat, sementara uji *LM* digunakan untuk memeriksa apakah model dengan efek acak atau model efek biasa lebih sesuai. Adapun ketiga pengujian ini dapat dilakukan setelah memperoleh hasil regresi data panel dari masing-masing model estimasi yang digunakan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan tahapan pengujian tersebut yaitu:

### a. Uji Chow

Uji *Chow* digunakan untuk menentukan apakah model *Fixed Effect* atau *Common Effect* yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data panel, dan berikut adalah hasil dari uji *Chow*:

**Tabel 4. 3 Hasil Uji Chow**

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	d.f.	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	197.895197	(37,149)	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	743.822298	37	0.0000

Sumber: *Eviews 10* (Data diolah oleh penulis tahun 2024)

Berdasarkan tabel diatas hasil uji *Chow* dengan *Redundant Fixed Effect Test* maka diperoleh nilai probabilitas *Cross section Chi-square* sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  (  $0,0000 < 0,05$ ) sehingga  $H_0$  ditolak. Karena  $H_0$  ditolak maka hasil tersebut mengindikasikan bahwa model *Fixed Effect* merupakan pilihan yang tepat untuk menguji hipotesis. Langkah berikutnya adalah melakukan pengujian untuk menentukan apakah model yang lebih sesuai untuk estimasi data panel adalah *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Untuk memilih model yang paling tepat antara keduanya, maka diperlukan pengujian selanjutnya yaitu uji *Hausman*.

### b. Uji Hausman

Uji *Hausman* digunakan untuk menentukan apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan untuk

mengestimasi data panel, dan berikut adalah hasil dari uji *Hausman*:

**Tabel 4. 4 Hasil Uji *Hausman***

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	18.937467		30.0003

Sumber: Eviews 10 (Data diolah oleh penulis tahun 2024)

Berdasarkan tabel diatas dari hasil uji *Hausman* diperoleh nilai (Prob.) cross section random sebesar 0,0003 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha=5\%$  ( $0,0003 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak. Oleh karena itu, model estimasi data panel yang sesuai adalah *Fixed Effect* dibandingkan dengan *Random Effect*. Maka, pengujian LM (*Lagrange Multiplier*) tidak perlu dilakukan karena *Fixed Effect Model* sudah dianggap sebagai model terbaik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Namun, jika uji *Hausman* menunjukkan bahwa *Random Effect Model* yang lebih tepat, maka pengujian lanjut dengan *Lagrange Multiplier* perlu dilakukan.

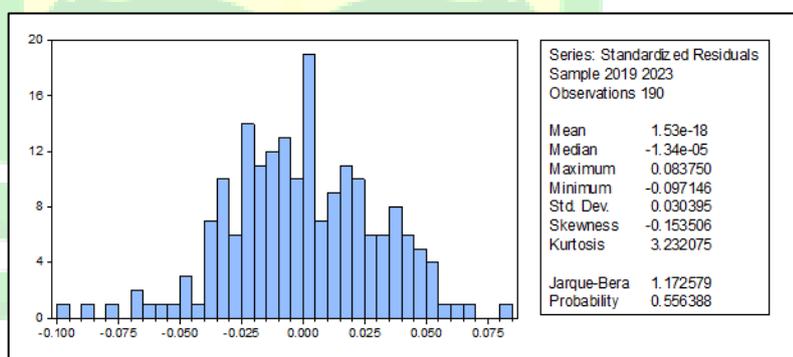
### 3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik diterapkan pada data penelitian yang menggunakan data sekunder. Sebelum melakukan uji hipotesis melalui uji t dan uji F, perlu dilakukan pengujian terhadap beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa asumsi-asumsi dasar dalam analisis regresi terpenuhi, sebagai

langkah awal dalam analisis data. Adapun asumsi klasik yang diuji adalah sebagai berikut:

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian mengikuti distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas atau menggunakan uji *Jarque Bera*. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data dianggap mengikuti distribusi normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak terdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil dari uji normalitas yang dilakukan:



**Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas**

Sumber: Eviews 10 (Data diolah oleh penulis tahun 2024)

Berdasarkan dari hasil uji normalitas di atas diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,556388 atau sudah lebih dari signifikansi 0,05 ( $0,556388 > 0,05$ ), maka dapat diambil kesimpulan bahwa data sudah berdistribusi normal.

### b. Uji *Multikolinieritas*

Uji *multikolinieritas* bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang ideal seharusnya tidak mengalami masalah *multikolinieritas*. Jika nilai *P-value* lebih besar dari 0,8, hal ini mengindikasikan adanya *multikolinieritas* antara variabel-variabel independen. Berikut ini adalah hasil dari uji *multikolinieritas* yang dilakukan:

**Tabel 4. 5 Hasil Uji *Multikolinieritas***

	IPM	TPT	UMK
IPM	1.000000	0.571880	0.437415
TPT	0.571880	1.000000	0.537528
UMK	0.437415	0.537528	1.000000

Sumber: Eviews 10 (Data diolah oleh penulis tahun 2024)

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji *multikolinieritas* menunjukkan bahwa nilai korelasi antara variabel IPM dan TPT adalah 0,571880, antara IPM dan UMK sebesar 0,437415, serta antara TPT dan UMK sebesar 0,537528. Karena nilai *P-value* untuk semua hubungan antar variabel independen kurang dari 0,8, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah *multikolinieritas* dalam model regresi ini.

### c. Uji *Heteroskedastisitas*

Uji *Heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* dalam model regresi. Dalam pengujian ini dilakukan menggunakan uji *park*.

Hipotesis:

H0 = Tidak terjadi gejala *heteroskedastisitas* dalam model regresi.

H1 = Terjadi gejala *heteroskedastisitas* dalam model regresi.

H0 akan diterima jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (*alpha*), dan sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (*alpha*), maka H0 ditolak.

**Tabel 4. 6 Uji *Heteroskedastisitas***

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	12.69060	13.45514	0.943178	0.3471
IPM	-0.242752	0.216307	-1.122253	0.2636
TPT	-0.091680	0.091865	-0.997990	0.3199
UMK	4.83E-07	1.16E-06	0.416627	0.6776

Sumber: Eviews 10 (Data diolah oleh penulis tahun 2024)

Berdasarkan tabel di atas hasil uji *heteroskedastisitas*, terlihat bahwa nilai probabilitas setiap variabel bebas lebih besar dari 0,05. Yaitu, variabel IPM memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,3471 > 0,05$ , TPT sebesar  $0,2636 > 0,05$ , dan UMK sebesar  $0,3199 > 0,05$ . Dengan demikian, H0 diterima dan dapat

disimpulkan bahwa data tersebut bebas dari gejala *heteroskedastisitas*.

#### d. Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi adanya masalah autokorelasi, digunakan uji *Durbin-Watson* ( $d$ ). Aturannya sebagai berikut: jika  $0 < d < d_L$ , maka ada autokorelasi positif; jika  $d_L < d < d_U$ , maka berada pada area ragu-ragu (tidak ada keputusan); jika  $d_U < d < 4 - d_U$ , maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif; jika  $4 - d_U < d < 4 - d_L$ , maka berada pada area ragu-ragu (tidak ada keputusan); dan jika  $4 - d_L < d < 4$ , maka terjadi autokorelasi negatif. Berikut adalah hasil uji autokorelasi:

**Tabel 4. 7 Nilai *Durbin-Watson***

<i>Durbin-Watson stat</i>	1.923864
---------------------------	----------

Sumber: Eviews 10 (Data diolah oleh penulis tahun 2024)

Berdasarkan tabel di atas, nilai *Durbin-Watson* ( $d$ ) yang diperoleh adalah 1,923864. Berdasarkan tabel *Durbin-Watson* dengan tingkat signifikansi 5%, jumlah data ( $n$ ) sebanyak 38, dan tiga variabel independen ( $k = 3$ ), diketahui bahwa nilai  $d_U$  adalah 1,656 dan nilai  $d_L$  adalah 1,318. Sementara itu, nilai  $4 - d_U$  adalah 2,344 dan nilai  $4 - d_L$  adalah 2,682. Dengan demikian, posisi  $d$  berada di antara  $d_U$  dan  $4 - d_L$ , atau memenuhi kriteria  $d_U < d < 4 - d_L$  ( $1,656 < 1,923864 < 2,344$ ). Berdasarkan perhitungan ini,

dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi.

#### 4. Uji Statistik

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, yaitu melalui uji *Chow* dan uji *Hausman*, diperoleh model pendekatan penelitian yang paling sesuai, yaitu *Fixed Effect Model*. Selanjutnya, akan dilakukan uji statistik pada model pendekatan yang telah dipilih tersebut.

**Tabel 4. 8 Hasil Uji *Fixed Effect Model***

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	6.069441	0.403581	15.03897	0.0000
IPM	-0.060627	0.006488	-9.344440	0.0000
TPT	0.015633	0.002755	5.673545	0.0000
UMK	2.12E-07	3.48E-08	6.110736	0.0000
<i>Effects Specification</i>				
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>				
<i>R-squared</i>	0.994973	<i>Mean dependent var</i>	2.278228	
<i>Adjusted R-squared</i>	0.993624	<i>S.D. dependent var</i>	0.428706	
<i>S.E. of regression</i>	0.034232	<i>Akaike info criterion</i>	-3.722789	
<i>Sum squared resid</i>	0.174606	<i>Schwarz criterion</i>	-3.022116	
<i>Log likelihood</i>	394.6650	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-3.438957	
<i>F-statistic</i>	737.3241	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.923864	
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000			

Sumber: Eviews 10 (Data diolah oleh penulis tahun 2024)

Berdasarkan hasil dari estimasi model penelitian pada tabel diatas maka dibuat persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 6,069441 - 0.060627_1 + 0.015633_2 + 2.12E-07_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kemiskinan (persen)

$\beta_0$  : Konstanta/Intercept

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien Regresi Parsial

X1 : IPM (persen)

X2 : TPT (persen)

X3 : UMK (juta rupiah)

*e* : *Error*

#### a. Uji F

Uji F digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen, yaitu IPM, TPT, dan UMK, secara simultan mempengaruhi variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Apabila nilai probabilitas F-statistik kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen tersebut berpengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.8, nilai F-statistik (F-hitung) adalah 737,3241 dengan nilai Probabilitas (F-statistic) sebesar  $0,000000 < 0,05$ . Dengan demikian, disimpulkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu IPM, TPT, dan UMK,

berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

**b. Uji t**

Uji t merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh atau tidak antara variabel bebas terhadap variabel terikat tetapi secara parsial. Berikut adalah rumus yang digunakan ketika menguji hipotesis pada uji t:

- 1) Apabila nilai  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  atau probabilitas  $t\text{-hitung} <$  tingkat signifikansi (0,05) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- 2) Apabila nilai  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  atau probabilitas  $t\text{-hitung} >$  tingkat signifikansi (0,05) maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Maka jika dilihat berdasarkan tabel 4.8 dapat dilakukan analisis uji t sebagai berikut:

- 1) Pengaruh IPM terhadap kemiskinan

Pengaruh variabel IPM terhadap kemiskinan memiliki hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : terdapat pengaruh secara parsial pada variabel X1 (IPM) terhadap variabel Y (Kemiskinan).

H0 : tidak terdapat pengaruh secara parsial pada variabel X1 (IPM) terhadap variabel Y (Kemiskinan).

Nilai t-statistik untuk variabel IPM adalah -9,344440 dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Hal ini menyebabkan H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel IPM secara statistik berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, koefisien IPM yang bernilai negatif sebesar -0,060627 menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah antara IPM dan kemiskinan. Artinya, setiap kenaikan IPM sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,060627%, meskipun dampaknya tergolong kecil, dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

## 2) Pengaruh TPT terhadap kemiskinan

Pengaruh variabel TPT terhadap kemiskinan memiliki hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : terdapat pengaruh secara parsial pada variabel X2 (TPT) terhadap variabel Y (Kemiskinan).

H<sub>0</sub> : tidak terdapat pengaruh secara parsial pada variabel X<sub>2</sub> (TPT) terhadap variabel Y (Kemiskinan).

Nilai t-statistik variabel TPT adalah 5,673545 dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima atau dapat disimpulkan bahwa secara statistik variabel TPT berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota yang ada pada provinsi Jawa Timur.

### 3) Pengaruh UMK terhadap Kemiskinan

Pengaruh variabel UMK terhadap kemiskinan memiliki hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : terdapat pengaruh secara parsial pada variabel X<sub>3</sub> (UMK) terhadap variabel Y (Kemiskinan).

H<sub>0</sub> : tidak terdapat pengaruh secara parsial pada variabel X<sub>3</sub> (UMK) terhadap variabel Y (Kemiskinan).

Nilai t-statistik variabel UMK adalah 6,110736 dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima dan dapat disimpulkan bahwa secara statistik variabel UMK berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota yang ada pada provinsi Jawa Timur.

### c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi atau biasa disebut  $R^2$ , mampu menentukan apakah variabel IPM, TPT, dan UMK mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap kemiskinan. Dasar pengambilan keputusan dilihat dari nilai Adjusted R-Squared dimana nilai tersebut berkisar dari 0 hingga 1. Semakin mendekati nol maka variabel *independent* tidak dapat menjelaskan pengaruhnya kepada variabel *dependent*. Berlaku sebaliknya, variabel *independent* mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel *dependent* yaitu kemiskinan jika nilai Adjusted R-Squared mendekati nilai satu. Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.993624 dimana nilai tersebut cenderung lebih mendekati 1. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel *independent* (IPM, TPT, dan UMK) mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel *dependent* (Kemiskinan) dengan persentasi 99,36% yang selanjutnya 0,64% sisanya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya.

### D. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil analisis data menunjukkan bahwa model pengaruh tetap (*fixed effect*) digunakan untuk menguji hipotesis. Model ini memiliki persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 40,10020 + 4,283900X_1 - 1,016271X_2 + 0,115358X_3 + e$$

Berikut ini merupakan analisis hipotesis dalam hubungan variabel independen (X) yaitu IPM TPT, dan UMK terhadap variabel dependen (Y) yaitu kemiskinan:

1. Pengaruh IPM terhadap kemiskinan.

Arsyad menyatakan bahwa memperluas akses pada layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi adalah bagian penting dari kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada serta menambahkan kesejahteraan pada masyarakat di suatu daerah. Dengan memperbaiki layanan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan gizi, angka kemiskinan dapat ditekan. Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dapat tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menjadi indikator utama dalam menilai aspek pendidikan, kesehatan, dan gizi di wilayah tersebut.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil analisis regresi dengan Fixed Effect Model, variabel IPM menunjukkan nilai t-statistik sebesar -9,344440 dengan probabilitas sebesar 0,0000, yang signifikan pada tingkat kesalahan 5%. Ini menunjukkan bahwa H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Koefisien IPM yang bernilai negatif sebesar -0,060627 mengindikasikan adanya hubungan yang berlawanan antara IPM dan

---

<sup>1</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*. (Yogyakarta: STIE YKPN, 2010), 307.

tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, setiap peningkatan IPM sebesar 1% akan mengurangi kemiskinan sebesar 0,060627%, meskipun pengaruhnya relatif kecil, dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang tercermin dalam IPM secara moderat berkontribusi dalam penurunan tingkat kemiskinan.

Teori Arsyad bahwa pembangunan kualitas manusia yang baik dapat menekan angka kemiskinan sejalan dengan penelitian ini. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rafi Taufik Ashari dan Moh. Athoillah pada tahun 2023 berjudul "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kawasan Tapal Kuda", yang juga menemukan bahwa IPM memiliki dampak yang sangat negatif terhadap kemiskinan.<sup>2</sup>

Akan tetapi penelitian ini mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tuty Lisa Awaliyah Harahap pada tahun 2021 dengan judul "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terhadap

---

<sup>2</sup> Ashari dan Moh. Athoillah, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Tapal Kuda." *Journal of Development Economic and Social Studies*, Volume 2, Nomor 2 (2023), 323.

Kemiskinan di Provinsi Riau”, yang memperoleh hasil bahwa IPM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi yang tercermin dalam IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Nilai koefisien IPM yang negatif (-0,060627) menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% pada IPM dapat mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,060627%, meskipun dampaknya relatif kecil. Hal ini memperkuat pandangan Arsyad yang menyatakan bahwa memperluas akses terhadap layanan sosial merupakan kebijakan penting dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kualitas hidup, yang diukur melalui IPM, menunjukkan kontribusinya dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Meskipun pengaruhnya bersifat moderat, hal ini tetap mengarah pada pengurangan kemiskinan, yang sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Rafi Taufik Ashari dan Moh. Athoillah (2023), yang juga menemukan hubungan negatif signifikan antara IPM dan kemiskinan. Namun, penelitian ini bertentangan dengan temuan Tuty

---

<sup>3</sup> Tuty Lisa Awaliyah Harahap, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Riau.” *Skripsi* (Universitas Islam Riau, 2020), 60.

Lisa Awaliyah Harahap (2021), yang menyatakan bahwa IPM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Riau.

Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan konteks daerah dan faktor-faktor lain yang memengaruhi tingkat kemiskinan di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, meskipun IPM memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, faktor-faktor lain, seperti distribusi pendapatan, kebijakan pemerintah, dan sektor ekonomi, juga harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan. Dengan meningkatkan kualitas layanan sosial dan distribusi yang lebih merata dari hasil pembangunan, tingkat kemiskinan di daerah-daerah yang memiliki IPM rendah dapat ditekan lebih lanjut.

Selanjutnya untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan IPM di wilayah Jawa Timur sendiri, langkah praktis yang dapat dilakukan diantaranya seperti perluasan akses pendidikan melalui program pendidikan gratis, beasiswa, dan juga membuka pelatihan keterampilan bagi masyarakat; peningkatan layanan kesehatan melalui pemerataan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan dan layanan kesehatan gratis hingga daerah-daerah pelososok yang masih tertinggal, selain itu penyuluhan serta perbaikan gizi masyarakat dengan distribusi makanan bergizi, kampanye gizi seimbang, dan dukungan bagi petani lokal. Dukungan teknologi, seperti platform digital untuk layanan

publik dan edukasi keterampilan digital juga penting dilakukan untuk memastikan program-program yang akan dilakukan tepat sasaran dan dapat berkelanjutan.

## 2. Pengaruh TPT terhadap kemiskinan.

Menurut Arsyad, terdapat hubungan erat antara tingkat pengangguran yang tinggi dan angka kemiskinan. Banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu cenderung masuk dalam kelompok ekonomi bawah. Sebaliknya, mereka yang memiliki pekerjaan dengan gaji tetap, baik di sektor pemerintah maupun swasta, umumnya tergolong dalam kelas ekonomi menengah ke atas. Seseorang yang tidak bekerja biasanya dianggap miskin, sedangkan mereka yang bekerja penuh waktu sering dikategorikan sebagai bagian dari kelompok ekonomi lebih sejahtera.<sup>4</sup>

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa TPT memiliki koefisien positif sebesar 0,015633 dengan nilai t-statistik 5,673545 dan probabilitas 0,0000, yang signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, H<sub>0</sub> ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa TPT memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan. Artinya, setiap peningkatan dalam tingkat pengangguran akan berdampak langsung pada peningkatan kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

---

<sup>4</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*. (Yogyakarta: STIE YKPN, 2010), 90.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Arsyad, yang menyatakan bahwa angka kemiskinan memiliki hubungan erat dengan tingginya tingkat pengangguran. Selain itu, hasil penelitian ini juga konsisten dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Rafi Taufik Ashari dan Moh. Athoillah pada tahun 2023, berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kawasan Tapal Kuda”, di mana TPT ditemukan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.<sup>5</sup>

Namun, studi Maftuh Bahrul Ilmi berjudul “Pengaruh PDRB, IPM, dan TPT Terhadap Kemiskinan Di Lima Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia Periode 2010–2019” tidak sejalan dengan penelitian ini. Studi tersebut menemukan bahwa TPT tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.<sup>6</sup>

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan berkualitas

---

<sup>5</sup> Ashari dan Moh. Athoillah, “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Tapal Kuda.” *Journal of Development Economic and Social Studies*, Volume 2, Nomor 2 (2023), 323.

<sup>6</sup> Maftuh Bahrul Ilmi, “Pengaruh PDRB, IPM Dan TPT Terhadap Kemiskinan Di Lima Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia Periode 2010- 2019”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 74-81.

merupakan langkah penting dalam mengurangi tingkat pengangguran, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi kemiskinan. Pengangguran yang tinggi berkontribusi besar terhadap kemiskinan karena orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu cenderung memiliki pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga mereka terjebak dalam kondisi ekonomi yang lebih rendah.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, kebijakan pemerintah harus lebih fokus pada upaya menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan memastikan bahwa pekerjaan yang tersedia dapat memberikan penghasilan yang layak bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok ekonomi rendah. Pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja melalui proyek padat karya, mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM), serta memberikan pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Memberikan perhatian khusus juga pada kelompok rentan seperti pemuda, perempuan, dan difabel untuk memastikan mereka juga mendapatkan peluang kerja yang setara. Selain itu pemerintah juga bisa mendorong investasi di daerah dengan pengangguran tinggi, mempermudah pinjaman usaha, dan menyediakan informasi lowongan pekerjaan melalui platform digital atau pusat layanan kerja seperti balai latihan kerja (BLK).

### 3. Pengaruh UMK terhadap kemiskinan.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Laila Ramadhani Putri dinyatakan bahwa kenaikan upah minimum bisa berdampak pada tingkat kemiskinan. Peningkatan upah ini cenderung mendorong bertambahnya jumlah tenaga kerja yang tersedia, namun di sisi lain mengurangi jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan. Ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja yang meningkat dan penyerapan yang terbatas menyebabkan kelebihan tenaga kerja, yang dapat meningkatkan pengangguran dan memperburuk kemiskinan. Dengan UMK yang lebih tinggi, perusahaan cenderung mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja dan keterampilan mereka saat ini tanpa menambahkan karyawan baru yang memiliki keahlian atau spesialisasi tertentu.<sup>7</sup>

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa upah minimum memiliki koefisien positif sebesar  $2,12E-07$ , dengan nilai t-statistik sebesar 6,110736 dan probabilitas 0,0000, yang signifikan pada tingkat 5%. Oleh karena itu,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti bahwa UMK berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan. Artinya, setiap peningkatan UMK akan secara langsung meningkatkan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

---

<sup>7</sup> Laila Ramadhani Putri, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan," *Skripsi* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018), 78.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Yulita Sutikno, Debby Ch. Rotinsulu, dan Steeva Y. L. Tumangkeng pada tahun 2019 yang berjudul "Pengaruh Upah Minimum dan Investasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara" juga menemukan bahwa upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan sehingga penelitian ini dianggap konsisten dengan penelitian tersebut.<sup>8</sup> Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damar Jati dkk, berjudul "Pengaruh Pengangguran, Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua", yang menemukan bahwa upah minimum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.<sup>9</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan UMK perlu diperhatikan secara cermat, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara meningkatkan pendapatan pekerja dan memastikan terserapnya tenaga kerja dalam sektor formal. Kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih berkualitas dapat

---

<sup>8</sup> Rizky Yulita Sutikno dkk, "Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara.," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 19, Nomor 1 (2019), 97.

<sup>9</sup> Damar Jati dkk, "Pengaruh Pengangguran, Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua" *Scientific Journals of Economic Education*, Volume 8, Nomor 2 (2024), 43.

membantu mengurangi dampak negatif dari kenaikan UMK terhadap kemiskinan. Kenaikan UMK yang justru meningkatkan kemiskinan dapat diatasi dengan memberikan dukungan kepada UMKM melalui subsidi, bantuan modal, atau insentif pajak agar tetap mampu mempekerjakan karyawan. Pemerintah juga perlu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas pekerja, sehingga perusahaan merasakan hasil kerja yang sebanding dengan upah yang lebih tinggi.

4. Pengaruh IPM, TPT, dan UMK terhadap kemiskinan.

Uji F dilakukan untuk menentukan apakah semua variabel independen IPM, TPT, dan UMK mempengaruhi variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, secara bersamaan atau tidak yang hasil uji F tersebut didasarkan pada model efek tetap di Eviews 10. Jika nilai probabilitas *F-statistic* kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.8, nilai *F-statistic* (F-hitung) adalah 737,3241 dengan probabilitas (F-statistic) 0,000000, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen IPM, TPT, dan UMK memiliki pengaruh simultan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan ini menegaskan bahwa masing-masing variabel (IPM, TPT, dan UMK) memiliki kontribusi yang nyata terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan atau penurunan salah satu variabel akan berdampak langsung pada kondisi kemiskinan di kabupaten/kota. Misalnya, IPM yang tinggi dapat menurunkan kemiskinan, sementara kenaikan TPT atau UMK juga berdampak signifikan pada perubahan tingkat kemiskinan.

Nilai Adjusted R-squared sebesar 99,36% juga menunjukkan bahwa model penelitian ini mampu menjelaskan 99,36% variasi kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur, sedangkan sisanya 0,64% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Tingginya persentase ini memperlihatkan bahwa IPM, TPT, dan UMK adalah faktor-faktor dominan yang memengaruhi kemiskinan, menjadikan model ini sangat relevan untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan kemiskinan di Jawa Timur.

Secara keseluruhan, keberhasilan dalam menurunkan kemiskinan di daerah tersebut memerlukan kebijakan yang komprehensif, yang secara simultan mengelola ketiga variabel ini. Kebijakan yang mampu mendorong peningkatan IPM, pengendalian tingkat pengangguran, serta pengaturan upah minimum yang tepat akan menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan

berkelanjutan. Hanya dengan cara ini masyarakat dapat merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi secara langsung dan menyeluruh, yang pada akhirnya akan membawa dampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan di daerah tersebut.

Solusi efektif yang melibatkan kebijakan untuk meningkatkan IPM, mengurangi TPT, dan menyesuaikan UMK untuk menurunkan tingkat kemiskinan di antara lain contohnya adalah: untuk meningkatkan akses pendidikan, pemerintah dapat menyediakan pendidikan gratis hingga tingkat menengah atas, memperluas program beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta mendirikan pusat pelatihan keterampilan (vokasi) berbasis kebutuhan industri lokal; untuk menurunkan TPT, dapat dilakukan melalui program padat karya, pelatihan kewirausahaan, dan penguatan UMKM agar mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak; kemudian untuk penyesuaian UMK harus dilakukan berdasarkan kajian yang memperhatikan daya saing dan kemampuan sektor usaha di tiap daerah, didukung insentif seperti keringanan pajak bagi UMKM. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat berdampak lebih terarah dalam mengurangi kemiskinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari analisis data yang telah di uji oleh peneliti dan pembahasan mengenai pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2019-2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, variabel IPM menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur, dengan nilai koefisien sebesar 0,412 dan signifikansi 0,000 ( $< 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti peningkatan IPM, yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Peningkatan IPM menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan akses yang lebih besar terhadap layanan publik, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, variabel TPT memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur, dengan nilai koefisien sebesar 0,299 dan signifikansi 0,005 ( $< 0,05$ ), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

3. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, variabel UMK juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur dengan nilai koefisien sebesar 0,794 dan signifikansi 0,000 ( $< 0,05$ ). Ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
4. Secara bersama-sama, keunggulan variabel IPM, TPT, dan UMK memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Model penelitian yang digunakan dalam analisis ini memiliki nilai Adjusted R-squared sebesar 0,993624, yang berarti bahwa 99,36% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh model ini, sementara sisanya 0,64% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang dianalisis dalam penelitian ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan memprioritaskan peningkatan IPM dengan memperluas akses pendidikan gratis hingga tingkat menengah atas, menyediakan program beasiswa bagi siswa kurang mampu, dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan pelatihan guru serta fasilitas belajar yang memadai. Dalam sektor kesehatan, layanan kesehatan yang merata dapat diwujudkan melalui pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, penyediaan tenaga medis yang cukup, serta program subsidi atau kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.

Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga produktivitas masyarakat, yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan.

2. Untuk mengurangi TPT, pemerintah dapat menyediakan lebih banyak program pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, seperti teknologi digital, pertanian modern, atau pariwisata. Program padat karya juga perlu diperluas untuk menyerap tenaga kerja kurang terampil. Selain itu, dukungan terhadap pengembangan UMKM melalui bantuan modal, pendampingan bisnis, dan kemudahan akses pasar dapat menciptakan lapangan kerja baru, sehingga pengangguran dan kemiskinan berkurang.
3. Penetapan UMK harus dilakukan berdasarkan kajian mendalam yang mempertimbangkan biaya hidup, produktivitas, dan kondisi ekonomi setiap daerah. Kebijakan ini dapat didukung dengan insentif pajak atau bantuan langsung kepada UMKM agar mampu menyesuaikan kenaikan upah tanpa mengurangi tenaga kerja. Evaluasi UMK secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan tetap relevan dengan inflasi dan kebutuhan pekerja, serta menjaga daya saing pelaku usaha di setiap sektor.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas batasan-batasan dalam penelitian ini, misalnya dengan memperpanjang periode penelitian, menambah variabel baru, atau mengganti variabel lain yang

juga berpotensi memengaruhi kemiskinan. Penelitian yang lebih komprehensif akan memberikan gambaran lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, sehingga rekomendasi yang diberikan dapat lebih spesifik dan efektif dalam membantu pemerintah menangani kemiskinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alhudhori. (2017). Pengaruh IPM, PDRB, dan jumlah pengangguran terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 1(1), 113-124.
- Al-Qur'an, Al-Ankabut, ayat 69.
- Amaroh, S., Husnurrosyidah, & Masykuroh, E. (2023). *Financial attitude, trust, and ROSCAs' member commitment: Social relations as mediating factor. Global Business & Finance Review Journal*, 28(3), 36.
- Amirudin. (2019). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2014-2017 (Studi Kasus: 34 provinsi). Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Ashari, R. T., & Athoillah, M. (2023). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di kawasan Tapal Kuda. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2, 313–326.
- Asrianti. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan belanja pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Skripsi, UIN Alauddin Makassar.
- Ayong, N., & Azizah, N. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di 38 kabupaten/kota Jawa Timur. *KAPALAMADA: Jurnal Multidisipliner*, 1(2), 112.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019. Diakses dari <https://www.bps.go.id> pada 5 November 2019.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019, 29 November). Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2019/11/29/96138ece33ccc220007acbdd/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2019.html> pada 5 November 2023, jam 15.00.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Indonesia Social Statistics 2020*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/23/9e8b9b4a1bc258b36bd74f56/statistik-indonesia-2020.html> pada 25 Mei 2020, jam 21.05.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Kemiskinan di Indonesia: Maret 2020. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> pada 26 Mei 2023, jam 22.00.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020, 15 Juli). Kemiskinan di Indonesia: Maret 2020. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1692/persentase-penduduk-dengan-garis-kemiskinan-maret-2020-sebesar-9604-persen.html> pada 20 Mei 2023, jam 16.00.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun 2022. Diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> pada 15 Juni 2023, jam 23.45.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun 2022. Diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> pada 15 Juni 2023.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Persentase penduduk miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html> pada 20 Maret 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022, 15 Juli). Persentase penduduk miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html> pada 20 Mei 2023, jam 16.29.

Badan Pusat Statistik (BPS). (n.d.). Indeks pembangunan manusia menurut provinsi. Diakses pada tanggal 29 September 2024, jam 17.00.

Badan Pusat Statistik (BPS). (n.d.). Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Jawa Timur (Ribukita), 2022-2024. Diakses dari

<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDIxIzI=/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html> pada 20 September 2023, jam 23.40.

Bappenas. (2015). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Diakses dari <https://www.bappenas.go.id/id/publikasi/detail/885/rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2015-2019> pada 20 Mei 2023, jam 16.58.

Chairunnisa, N. M., & Qintharah, Y. N. (2022). Pengaruh kesehatan, tingkat pendidikan, dan upah minimum terhadap kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2020. *Jurnal PETA*, 7(1), 147–161.

Dama, H. Y., Lopian, A. L. C., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado 2005-2014. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16, 550.

Fadlillah, N., Sukiman, & Agustin, S. D. (2016). Analisis pengaruh pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, IPM dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2009-2013. *Eko-Regional*, 11, 18–26.

Faizin, M. (2021). Pengaruh upah minimum, kemiskinan dan pengangguran pada IPM di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 12, 214–227.

Farenza, B. (2019). Pengaruh sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perikanan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2013-2017. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Fitrilawati, & Diniyati. (2020). Analisis pengaruh kemiskinan terhadap kualitas hidup masyarakat di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Wacana Akuntansi*, 3(1), 87.

Fitrilawati, F., & Diniyati, D. (2020). Analisis pengaruh kemiskinan terhadap kualitas hidup masyarakat di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Wacana Akuntansi*, 31, 77–88.

Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.

Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Gunawan, I. (2017). *Pengantar Statistika Inferensial I, II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanifa, S., & Hanifah, N. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Lamongan. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 1(3), 191–206.
- Harahap, T. L. A. (2020). Analisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB, IPM, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. Skripsi, Universitas Islam Riau.
- Ilmi, M. B. (2021). Pengaruh PDRB, IPM dan TPT terhadap kemiskinan di lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia periode 2010-2019. Skripsi, IAIN Ponorogo.
- Huda, Miftahul, Lia Noviana, dan Lukman Santoso. (2020) “Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi Di Asia Tenggara/Development The Governance of Corporate-Based Waqf In South East Asia.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, 12(2), 133.
- Izzaty, & Sari, R. (2013). Kebijakan penetapan upah minimum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 131–145.
- Jati, D., dkk. (2024). Pengaruh pengangguran, pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Papua. *Scientific Journals of Economic Education*, 8(2), 43.
- Kusuma, N. A., & Az Zakiyyah, N. A. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di 38 kabupaten/kota Jawa Timur. *Kapal Muda: Jurnal Multidisipliner*, 1(2), 98–113.
- Lely, Y. (2024, 20 September). Tingkat pengangguran terbuka Jatim turun signifikan di angka 4,88 persen. Diakses dari <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/482304/tingkat-pengangguran-terbuka-jatim-turun-signifikan-di-angka-488-persen> pada 20 September 2024, jam 23.17.
- Leonita, L., & Sari, R. K. (2019). Pengaruh PDRB, pengangguran dan pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3, 1–88. Diakses dari <http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/isoquant>.
- Lestari, R. P. (2017). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pengangguran, dan produk domestik regional bruto terhadap tingkat

kemiskinan di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2011-2015. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Linggawati, N. W., & Wenagama, I. W. (2022). Pengaruh pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat upah terhadap jumlah pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(4), 400–411.

Machmud, A. (2016). *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga.

Maharani, S., Ab Rahman, A., & Dewi, V. S. (2023). *Learn from the biggest accounting fraud in 95 years: A bibliometric analysis*. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 23(1), 20.

Maharani, S., Ab Rahman, A., & Dwi Septian, A. (2021). *Customer satisfaction and sharia service quality at Surya Mart Ponorogo: Case study from Indonesia*. *European Journal of Islamic Finance*, 17, 1.

Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9, 51–72.

Mauludi, A., Fadllan, & Rahmawati, F. N. (2023). Pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan belanja modal terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2017-2021. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(1), 67–88.

Napitulu, A. S. (2007). Pengaruh indikator komposit indeks pembangunan manusia terhadap penurunan penduduk miskin di Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.

Ningrum, S. S. (2017). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 191.

Nugroho, A., & Clarissa, A. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Open Data Jawa Barat. (n.d.). Persentase penduduk miskin berdasarkan provinsi di Indonesia. Diakses dari

<https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/persentase-penduduk-miskin-berdasarkan-provinsi-di-indonesia> pada 25 Mei 2023, jam 20.31.

Pemerintah Jawa Timur. (n.d.). *Keputusan Gubernur Jawa Timur*. Diakses dari <https://dokumjdih.jatimprov.go.id> pada 15 September 2024, jam 13.00.

Praja, R. B., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. *Ecoplan*, 6(April), 78–86.

Prasetyo, L., Jannah, U. R., & Fitrianna, N. (2022). Corporate governance model of Islamic philanthropy at Islamic hospitals in Ponorogo. *IQTISHADIA: Journal of Islamic Economics and Business*, 15(2), 290

Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–240.

Prayoga, M. L., Muchtolifah, & Sishadiyanti. (2021). Faktor kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 135–143.

Putra, G. M. A. (2018). Analisis kemiskinan di Jawa Tengah. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

Putri, L. R. (2018). Pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang.

Putri, T. L., & Hutabarat, R. E. (2023). Analisis pengaruh pengangguran, penanaman modal dalam negeri, dan upah minimum provinsi terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 68-69.

Rahmawati, D., & Sebayang, A. F. (2023). Pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan upah minimum provinsi terhadap kemiskinan ekstrem. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 93–100.

Ristika, E. D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 129–136.

- Roseline, F. C., & Maimunah, E. (2022). Analisis pengaruh PDRB perkapita, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. *Cakrawala Repositori*, 5(2), 227–240.
- Saefullah, E., & Anggriawan, M. A. (2022). Tingkat pengangguran terbuka memediasi dampak indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto dan upah minimum kabupaten/kota terhadap kemiskinan. *Prosiding The 2nd National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 2(1), 63–72.
- Sembiring, F., Tarmizi, & Rujiman. (2020). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, pengangguran terbuka dan angkatan kerja terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. *Serambi Engineering*, 5(2), 974–984.
- Setiawan, & Kusriani, D. E. (2010). *Ekonometrika*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sugiono, A., Masykuroh, E., Sungkawati, E., Setyadjit, S., Dahliani, L., Yustina, I., Yogopriyatno, J., & Hermawati, I. (2023). Developing model of logistics capability, supply chain policy on logistics integration and competitive advantage of SMEs. *Growing Science Ltd.*, 11(3), 1009.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (n.d.). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabaru Press.
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryaningtyas, R. Y. I. (2021). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di 5 provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010-2020. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah.
- Sutikno, R. Y., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, S. Y. L. (2019). Pengaruh upah minimum dan investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(1), 88–98.
- Syaifullah, & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2), 244–245.

- Syaifullah, A., & Malik, N. (2017). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan produk domestik bruto terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN-4. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 107–119.
- Tanzeh, A. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Ulya, H. N. (2019). Paradigma kemiskinan dalam perspektif Islam dan konvensional. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 139.
- Utami, F. P. (2020). Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), kemiskinan, pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4, 101–113.
- Widarjono, A. (2016). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wiryan, W. G. (2015). *Ironi Upah Minimum dalam Industri Pariwisata*. Malang: Media Nusa Creative.
- Yuana, L. (n.d.). Tingkat pengangguran terbuka Jatim turun signifikan di angka 4,88 persen. *Times Indonesia*.
- Yudistira, H., dkk. (2019). Pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado 2005-2014. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 550.
- Yusuf, M. Z., Hidayati, N., Wibowo, M. G., & Khusniati, N. (2022). Pengaruh pendidikan dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 19(1), 25–38.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Data Penelitian

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kemiskinan</b>	<b>IPM</b>	<b>TPT</b>	<b>UMK</b>
Kabupaten Pacitan	2019	13.67	68.16	0.91	1763267.65
Kabupaten Pacitan	2020	14.54	68.39	2.28	1913321.73
Kabupaten Pacitan	2021	15.11	68.57	2.04	1961154.77
Kabupaten Pacitan	2022	13.80	69.37	3.65	1961154.77
Kabupaten Pacitan	2023	13.65	70.19	1.83	2157270.25
Kabupaten Ponorogo	2019	9.64	70.56	3.50	1763267.65
Kabupaten Ponorogo	2020	9.95	70.81	4.45	1913321.73
Kabupaten Ponorogo	2021	10.26	71.06	4.38	1938321.73
Kabupaten Ponorogo	2022	9.32	71.87	5.51	1954281.32
Kabupaten Ponorogo	2023	9.53	72.50	4.66	2149709.45
Kabupaten Trenggalek	2019	10.98	69.46	3.36	1763267.65
Kabupaten Trenggalek	2020	11.62	69.74	4.11	1913321.73
Kabupaten Trenggalek	2021	12.14	70.06	3.53	1938321.73
Kabupaten Trenggalek	2022	10.96	71.00	5.37	1944932.74
Kabupaten Trenggalek	2023	10.63	71.73	4.52	2139426.01
Kabupaten Tulungagung	2019	6.74	72.62	3.29	1805219.94
Kabupaten Tulungagung	2020	7.33	73.00	4.61	1958844.16
Kabupaten Tulungagung	2021	7.51	73.15	4.91	2010000.00
Kabupaten Tulungagung	2022	6.71	74.06	6.65	2029358.67
Kabupaten Tulungagung	2023	6.53	74.61	5.65	2229358.67
Kabupaten Blitar	2019	8.94	70.57	3.05	1801406.09
Kabupaten Blitar	2020	9.33	70.58	3.82	1954705.75
Kabupaten Blitar	2021	9.65	71.05	3.66	2004705.75
Kabupaten Blitar	2022	8.71	71.86	5.45	2015071.18
Kabupaten Blitar	2023	8.69	72.49	4.91	2215071.18
Kabupaten Kediri	2019	10.42	71.85	3.58	1850986.07
Kabupaten Kediri	2020	11.40	72.05	5.24	2008504.16
Kabupaten Kediri	2021	11.64	72.56	5.15	2033504.99
Kabupaten Kediri	2022	10.65	73.46	6.83	2043422.93
Kabupaten Kediri	2023	10.72	73.96	5.79	2243422.93
Kabupaten Malang	2019	9.47	70.35	3.70	2781564.24

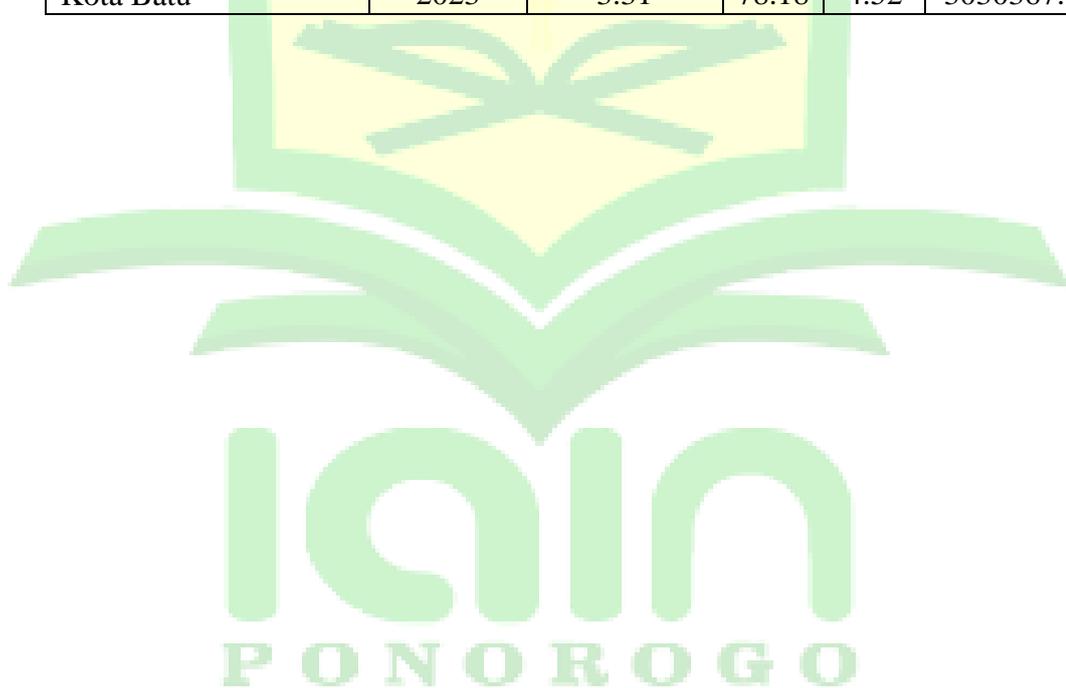
Kabupaten Malang	2020	10.15	70.36	5.49	3018530.66
Kabupaten Malang	2021	10.50	70.60	5.40	3068275.36
Kabupaten Malang	2022	9.55	71.38	6.57	3068275.36
Kabupaten Malang	2023	9.45	72.16	5.70	3268275.36
Kabupaten Lumajang	2019	9.49	65.33	2.73	1826831.72
Kabupaten Lumajang	2020	9.83	65.46	3.36	1982295.10
Kabupaten Lumajang	2021	10.05	66.07	3.51	1982295.10
Kabupaten Lumajang	2022	9.06	66.95	4.97	2000607.20
Kabupaten Lumajang	2023	8.93	67.87	3.67	2200607.20
Kabupaten Jember	2019	9.25	66.69	3.69	2170917.80
Kabupaten Jember	2020	10.09	67.11	5.12	2456302.97
Kabupaten Jember	2021	10.41	67.32	5.44	2355662.91
Kabupaten Jember	2022	9.39	67.97	4.06	2355662.91
Kabupaten Jember	2023	9.51	68.64	4.01	2555662.91
Kabupaten Banyuwangi	2019	7.52	70.60	3.95	2132779.35
Kabupaten Banyuwangi	2020	8.06	70.62	5.34	2319796.75
Kabupaten Banyuwangi	2021	8.07	71.38	5.42	2314278.87
Kabupaten Banyuwangi	2022	7.51	71.94	5.26	2328899.12
Kabupaten Banyuwangi	2023	7.34	72.61	4.75	2528899.12
Kabupaten Bondowoso	2019	13.33	66.09	2.86	1801406.09
Kabupaten Bondowoso	2020	14.17	66.43	4.13	1954705.75
Kabupaten Bondowoso	2021	14.73	66.59	4.46	1954705.75
Kabupaten Bondowoso	2022	13.47	67.31	4.32	1958640.12
Kabupaten Bondowoso	2023	13.34	67.99	4.15	2154504.13
Kabupaten Situbondo	2019	11.20	67.09	2.77	1763267.65
Kabupaten Situbondo	2020	12.22	67.38	3.85	1913321.73
Kabupaten Situbondo	2021	12.63	67.78	3.68	1938321.73
Kabupaten Situbondo	2022	11.78	68.25	3.38	1942750.77
Kabupaten Situbondo	2023	11.90	69.16	3.27	2137025.85
Kabupaten Probolinggo	2019	17.76	65.60	3.77	2306944.93

Kabupaten Probolinggo	2020	18.61	66.07	4.86	2503265.94
Kabupaten Probolinggo	2021	18.91	66.26	4.55	2553265.95
Kabupaten Probolinggo	2022	17.12	66.96	3.25	2553265.95
Kabupaten Probolinggo	2023	17.19	67.79	3.24	2753265.95
Kabupaten Pasuruan	2019	8.68	68.29	5.22	3861518.00
Kabupaten Pasuruan	2020	9.26	68.60	6.24	4190133.19
Kabupaten Pasuruan	2021	9.70	68.93	6.03	4290133.19
Kabupaten Pasuruan	2022	8.96	69.68	5.91	4365133.19
Kabupaten Pasuruan	2023	9.24	70.29	5.48	4515133.19
Kabupaten Sidoarjo	2019	5.32	80.05	4.62	3864696.20
Kabupaten Sidoarjo	2020	5.59	80.29	10.97	4193581.85
Kabupaten Sidoarjo	2021	5.93	80.65	10.87	4293581.85
Kabupaten Sidoarjo	2022	5.36	81.02	8.80	4368581.85
Kabupaten Sidoarjo	2023	5.00	81.55	8.05	4518581.85
Kabupaten Mojokerto	2019	9.75	73.53	3.61	3851983.38
Kabupaten Mojokerto	2020	10.57	73.83	5.75	4179787.17
Kabupaten Mojokerto	2021	10.62	74.15	5.54	4279787.17
Kabupaten Mojokerto	2022	9.71	74.89	4.83	4354787.17
Kabupaten Mojokerto	2023	9.80	75.53	4.67	4504787.17
Kabupaten Jombang	2019	9.22	72.85	4.28	2445945.88
Kabupaten Jombang	2020	9.94	72.97	7.48	2794801.59
Kabupaten Jombang	2021	10.00	73.45	7.09	2654095.88
Kabupaten Jombang	2022	9.04	74.05	5.47	2654095.88
Kabupaten Jombang	2023	9.15	74.60	4.66	2854095.88
Kabupaten Nganjuk	2019	11.24	71.71	3.16	1801406.09
Kabupaten Nganjuk	2020	11.62	71.72	4.80	1954705.75
Kabupaten Nganjuk	2021	11.85	71.97	4.98	1954705.75
Kabupaten Nganjuk	2022	10.70	72.93	4.74	1970006.41
Kabupaten Nganjuk	2023	10.89	73.71	4.68	2167007.05
Kabupaten Madiun	2019	10.54	71.69	3.52	1763267.65
Kabupaten Madiun	2020	11.46	71.73	4.80	1913321.73
Kabupaten Madiun	2021	11.91	71.88	4.99	1951588.16
Kabupaten Madiun	2022	10.79	72.39	5.84	1958410.31
Kabupaten Madiun	2023	11.04	72.97	5.14	2154251.34
Kabupaten Magetan	2019	9.61	73.49	2.98	1763267.65
Kabupaten Magetan	2020	10.35	73.92	3.74	1913321.73

Kabupaten Magetan	2021	10.66	74.15	3.86	1938321.73
Kabupaten Magetan	2022	9.84	74.85	4.33	1957329.43
Kabupaten Magetan	2023	9.80	75.41	4.16	2153062.37
Kabupaten Ngawi	2019	14.39	70.41	3.60	1763267.65
Kabupaten Ngawi	2020	15.44	70.54	5.44	1913321.73
Kabupaten Ngawi	2021	15.57	71.04	4.25	1960510.00
Kabupaten Ngawi	2022	14.15	71.75	2.48	1962585.99
Kabupaten Ngawi	2023	14.40	72.47	2.41	2158844.59
Kabupaten Bojonegoro	2019	12.38	68.75	3.56	1858613.77
Kabupaten Bojonegoro	2020	12.87	69.04	4.92	2016780.00
Kabupaten Bojonegoro	2021	13.27	69.59	4.82	2066781.80
Kabupaten Bojonegoro	2022	12.21	70.12	4.69	2079568.07
Kabupaten Bojonegoro	2023	12.18	70.85	4.63	2279568.07
Kabupaten Tuban	2019	14.58	68.37	2.70	2333641.85
Kabupaten Tuban	2020	15.91	68.40	4.81	2654095.87
Kabupaten Tuban	2021	16.31	68.91	4.68	2532234.77
Kabupaten Tuban	2022	15.02	69.67	4.54	2539224.88
Kabupaten Tuban	2023	14.91	70.34	4.40	2739224.88
Kabupaten Lamongan	2019	13.21	72.57	3.89	2233641.85
Kabupaten Lamongan	2020	13.85	72.58	5.13	2314278.87
Kabupaten Lamongan	2021	13.86	73.12	4.90	2488724.77
Kabupaten Lamongan	2022	12.53	74.02	6.05	2501977.27
Kabupaten Lamongan	2023	12.42	74.53	5.46	2701977.27
Kabupaten Gresik	2019	11.35	76.10	5.40	3867874.40
Kabupaten Gresik	2020	12.40	76.11	8.21	4197030.51
Kabupaten Gresik	2021	12.42	76.50	8.00	4297030.51
Kabupaten Gresik	2022	11.06	77.16	7.84	4372030.51
Kabupaten Gresik	2023	10.96	77.98	6.82	4522030.51
Kabupaten Bangkalan	2019	18.90	63.79	5.62	1801406.09
Kabupaten Bangkalan	2020	20.56	64.11	8.77	1954705.75
Kabupaten Bangkalan	2021	21.57	64.36	8.07	1954705.75
Kabupaten Bangkalan	2022	19.44	65.05	8.05	1956773.48
Kabupaten Bangkalan	2023	19.35	65.75	6.18	2152450.83
Kabupaten Sampang	2019	20.71	61.94	2.71	1763267.65
Kabupaten Sampang	2020	22.78	62.70	3.35	1913321.73

Kabupaten Sampang	2021	23.76	62.80	3.45	1938321.73
Kabupaten Sampang	2022	21.61	63.39	3.11	1922122.97
Kabupaten Sampang	2023	21.76	64.13	2.72	2114335.27
Kabupaten Pamekasan	2019	13.95	65.94	2.26	1763267.65
Kabupaten Pamekasan	2020	14.60	66.26	3.49	1913321.73
Kabupaten Pamekasan	2021	15.30	66.40	3.10	1938321.73
Kabupaten Pamekasan	2022	13.93	66.99	1.40	1939686.39
Kabupaten Pamekasan	2023	13.85	67.96	1.74	2133655.03
Kabupaten Sumenep	2019	19.48	66.22	2.08	1801406.09
Kabupaten Sumenep	2020	20.18	66.43	2.84	1954705.75
Kabupaten Sumenep	2021	20.51	67.04	2.31	1954705.75
Kabupaten Sumenep	2022	18.76	67.87	1.36	1978927.22
Kabupaten Sumenep	2023	18.70	68.61	1.71	2176819.94
Kota Kediri	2019	7.16	78.08	4.15	1899294.78
Kota Kediri	2020	7.69	78.23	6.21	2060925.00
Kota Kediri	2021	7.75	78.60	6.37	2085924.76
Kota Kediri	2022	7.23	79.59	4.38	2118116.63
Kota Kediri	2023	7.15	80.44	4.06	2318116.63
Kota Blitar	2019	7.13	78.56	4.54	1801406.09
Kota Blitar	2020	7.78	78.57	6.68	1954635.76
Kota Blitar	2021	7.89	78.98	6.61	2004705.75
Kota Blitar	2022	7.37	79.93	5.39	2039024.44
Kota Blitar	2023	7.30	80.63	5.24	2239024.44
Kota Malang	2019	4.07	81.32	5.88	2668420.18
Kota Malang	2020	4.44	81.45	9.61	2895502.74
Kota Malang	2021	4.62	82.04	9.65	2970502.73
Kota Malang	2022	4.37	82.71	7.66	2994143.98
Kota Malang	2023	4.26	83.39	6.80	3194143.98
Kota Probolinggo	2019	6.91	73.27	4.25	2137864.48
Kota Probolinggo	2020	7.43	73.27	6.70	2355662.90
Kota Probolinggo	2021	7.44	73.66	6.55	2350000.00
Kota Probolinggo	2022	6.65	74.56	4.57	2376240.63
Kota Probolinggo	2023	6.48	75.43	4.53	2576240.63
Kota Pasuruan	2019	6.46	75.25	4.89	2575616.61
Kota Pasuruan	2020	6.66	75.26	6.33	2532234.77
Kota Pasuruan	2021	6.88	75.62	6.23	2819801.59
Kota Pasuruan	2022	6.37	76.54	6.18	2838837.64
Kota Pasuruan	2023	6.60	77.17	5.64	3038837.64
Kota Mojokerto	2019	5.15	77.96	2.63	2263665.07

Kota Mojokerto	2020	6.24	78.04	6.74	2423724.77
Kota Mojokerto	2021	6.39	78.43	6.87	2481302.97
Kota Mojokerto	2022	5.98	79.32	5.05	2510452.36
Kota Mojokerto	2023	5.77	80.07	4.73	2710452.36
Kota Madiun	2019	4.35	80.88	3.96	1801406.09
Kota Madiun	2020	4.98	80.91	8.32	1954705.75
Kota Madiun	2021	5.09	81.25	8.15	1954705.75
Kota Madiun	2022	4.76	82.01	6.39	1991105.79
Kota Madiun	2023	4.74	82.71	5.85	2190216.37
Kota Surabaya	2019	4.51	82.22	5.76	3871052.61
Kota Surabaya	2020	5.02	82.23	9.79	4200479.19
Kota Surabaya	2021	5.23	82.31	9.68	4300479.19
Kota Surabaya	2022	4.72	82.74	7.62	4375479.19
Kota Surabaya	2023	4.65	83.45	6.76	4525479.19
Kota Batu	2019	3.81	75.88	2.42	2575616.61
Kota Batu	2020	3.89	75.90	5.93	2794800.00
Kota Batu	2021	4.09	76.28	6.57	2819801.59
Kota Batu	2022	3.79	77.22	8.43	2830367.09
Kota Batu	2023	3.31	78.18	4.52	3030367.09



Lampiran 2 *Output Olahan Data*

**1. Hasil Uji *Random Effect Model***

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 09/03/24 Time: 13:07  
 Sample: 2019 2023  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 38  
 Total panel (balanced) observations: 190  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	51.58860	3.834983	13.45211	0.0000
X1	-0.642715	0.060635	-10.59978	0.0000
X2	0.123011	0.032422	3.794096	0.0002
X3	2.04E-06	3.37E-07	6.048504	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.728818	0.9766
Idiosyncratic random			0.422173	0.0234
Weighted Statistics				
R-squared	0.444587	Mean dependent var		0.735207
Adjusted R-squared	0.435629	S.D. dependent var		0.585544
S.E. of regression	0.439888	Sum squared resid		35.99125
F-statistic	49.62860	Durbin-Watson stat		1.574694
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.475780	Mean dependent var		10.65163
Sum squared resid	1930.314	Durbin-Watson stat		0.029361



## 2. Hasil Uji *Fixed Effect Model*

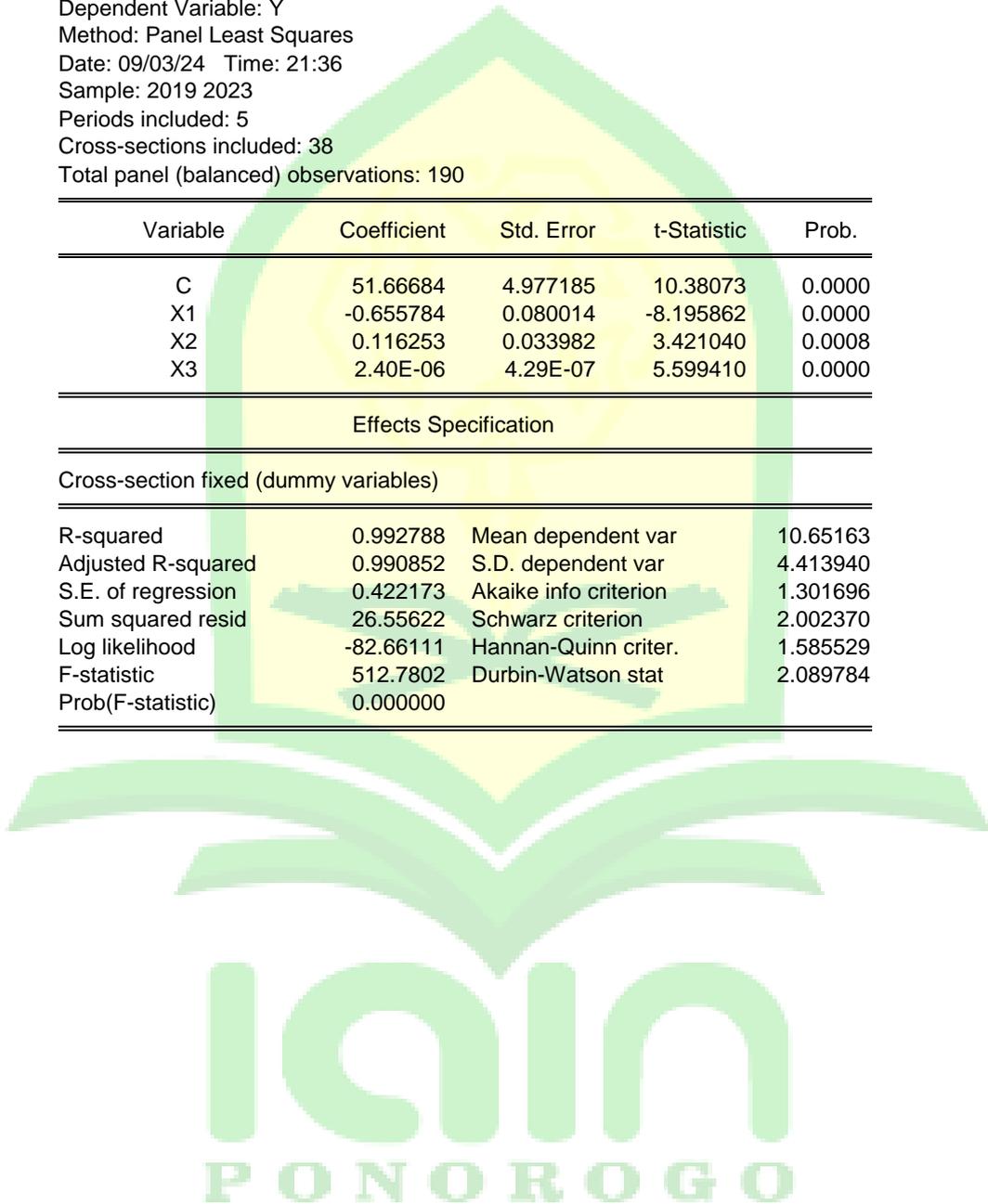
Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 09/03/24 Time: 21:36  
Sample: 2019 2023  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 38  
Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	51.66684	4.977185	10.38073	0.0000
X1	-0.655784	0.080014	-8.195862	0.0000
X2	0.116253	0.033982	3.421040	0.0008
X3	2.40E-06	4.29E-07	5.599410	0.0000

### Effects Specification

#### Cross-section fixed (dummy variables)

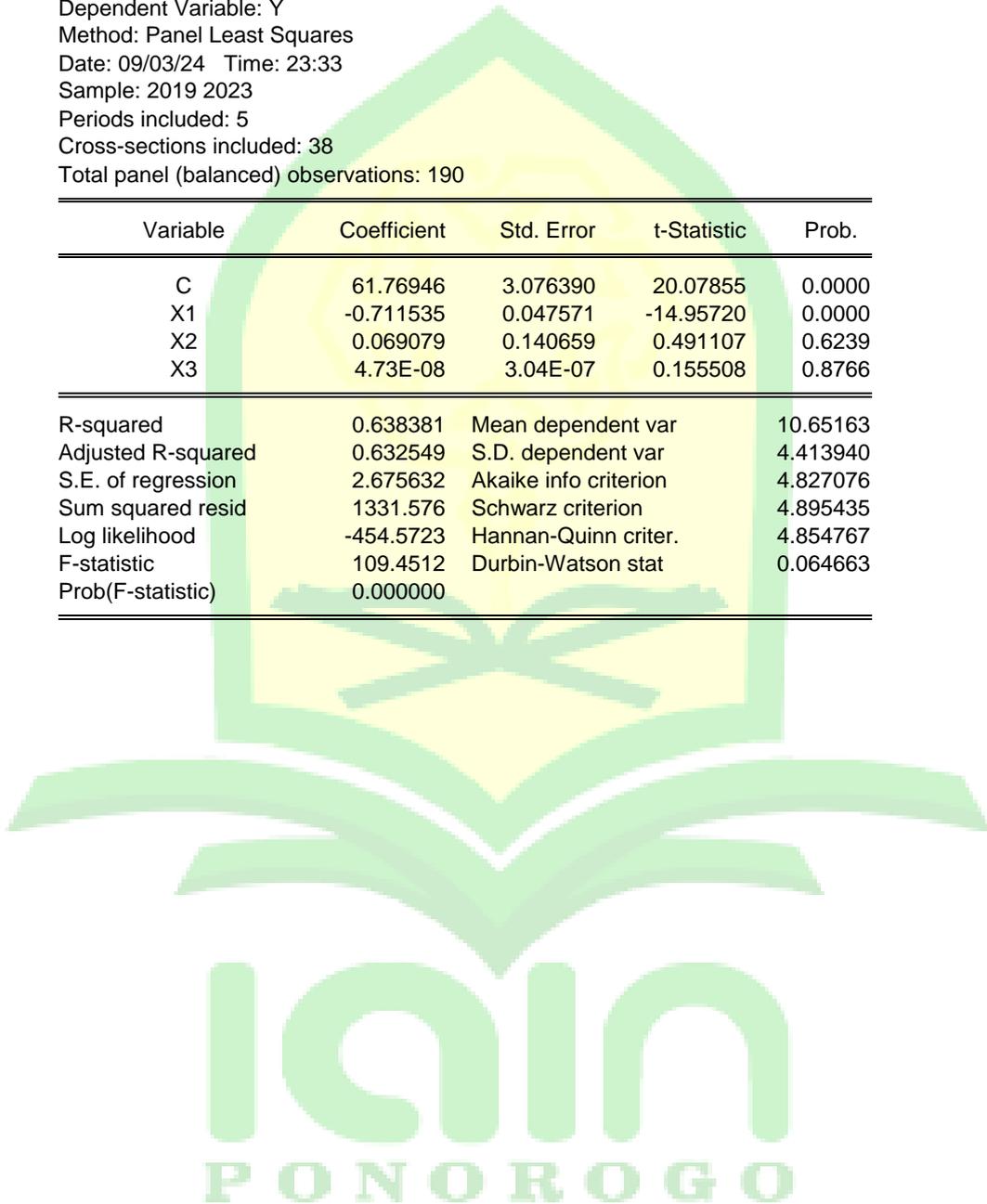
R-squared	0.992788	Mean dependent var	10.65163
Adjusted R-squared	0.990852	S.D. dependent var	4.413940
S.E. of regression	0.422173	Akaike info criterion	1.301696
Sum squared resid	26.55622	Schwarz criterion	2.002370
Log likelihood	-82.66111	Hannan-Quinn criter.	1.585529
F-statistic	512.7802	Durbin-Watson stat	2.089784
Prob(F-statistic)	0.000000		



### 3. Hasil Uji *Common Effect Model*

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 09/03/24 Time: 23:33  
Sample: 2019 2023  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 38  
Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	61.76946	3.076390	20.07855	0.0000
X1	-0.711535	0.047571	-14.95720	0.0000
X2	0.069079	0.140659	0.491107	0.6239
X3	4.73E-08	3.04E-07	0.155508	0.8766
R-squared	0.638381	Mean dependent var		10.65163
Adjusted R-squared	0.632549	S.D. dependent var		4.413940
S.E. of regression	2.675632	Akaike info criterion		4.827076
Sum squared resid	1331.576	Schwarz criterion		4.895435
Log likelihood	-454.5723	Hannan-Quinn criter.		4.854767
F-statistic	109.4512	Durbin-Watson stat		0.064663
Prob(F-statistic)	0.000000			



#### 4. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	197.895197	(37,149)	0.0000
Cross-section Chi-square	743.822298	37	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 11/08/24 Time: 18:45  
Sample: 2019 2023  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 38  
Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	61.76946	3.076390	20.07855	0.0000
X1	-0.711535	0.047571	-14.95720	0.0000
X2	0.069079	0.140659	0.491107	0.6239
X3	4.73E-08	3.04E-07	0.155508	0.8766

R-squared	0.638381	Mean dependent var	10.65163
Adjusted R-squared	0.632549	S.D. dependent var	4.413940
S.E. of regression	2.675632	Akaike info criterion	4.827076
Sum squared resid	1331.576	Schwarz criterion	4.895435
Log likelihood	-454.5723	Hannan-Quinn criter.	4.854767
F-statistic	109.4512	Durbin-Watson stat	0.064663
Prob(F-statistic)	0.000000		



## 5. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	18.937467	3	0.0003

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.655784	-0.642715	0.002726	0.8023
X2	0.116253	0.123011	0.000104	0.5067
X3	0.000002	0.000002	0.000000	0.1698

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 11/08/24 Time: 22:14  
Sample: 2019 2023  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 38  
Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	51.66684	4.977185	10.38073	0.0000
X1	-0.655784	0.080014	-8.195862	0.0000
X2	0.116253	0.033982	3.421040	0.0008
X3	2.40E-06	4.29E-07	5.599410	0.0000

### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.992788	Mean dependent var	10.65163
Adjusted R-squared	0.990852	S.D. dependent var	4.413940
S.E. of regression	0.422173	Akaike info criterion	1.301696
Sum squared resid	26.55622	Schwarz criterion	2.002370
Log likelihood	-82.66111	Hannan-Quinn criter.	1.585529
F-statistic	512.7802	Durbin-Watson stat	2.089784
Prob(F-statistic)	0.000000		

## 6. Hasil Uji *Heteroskedastisitas*

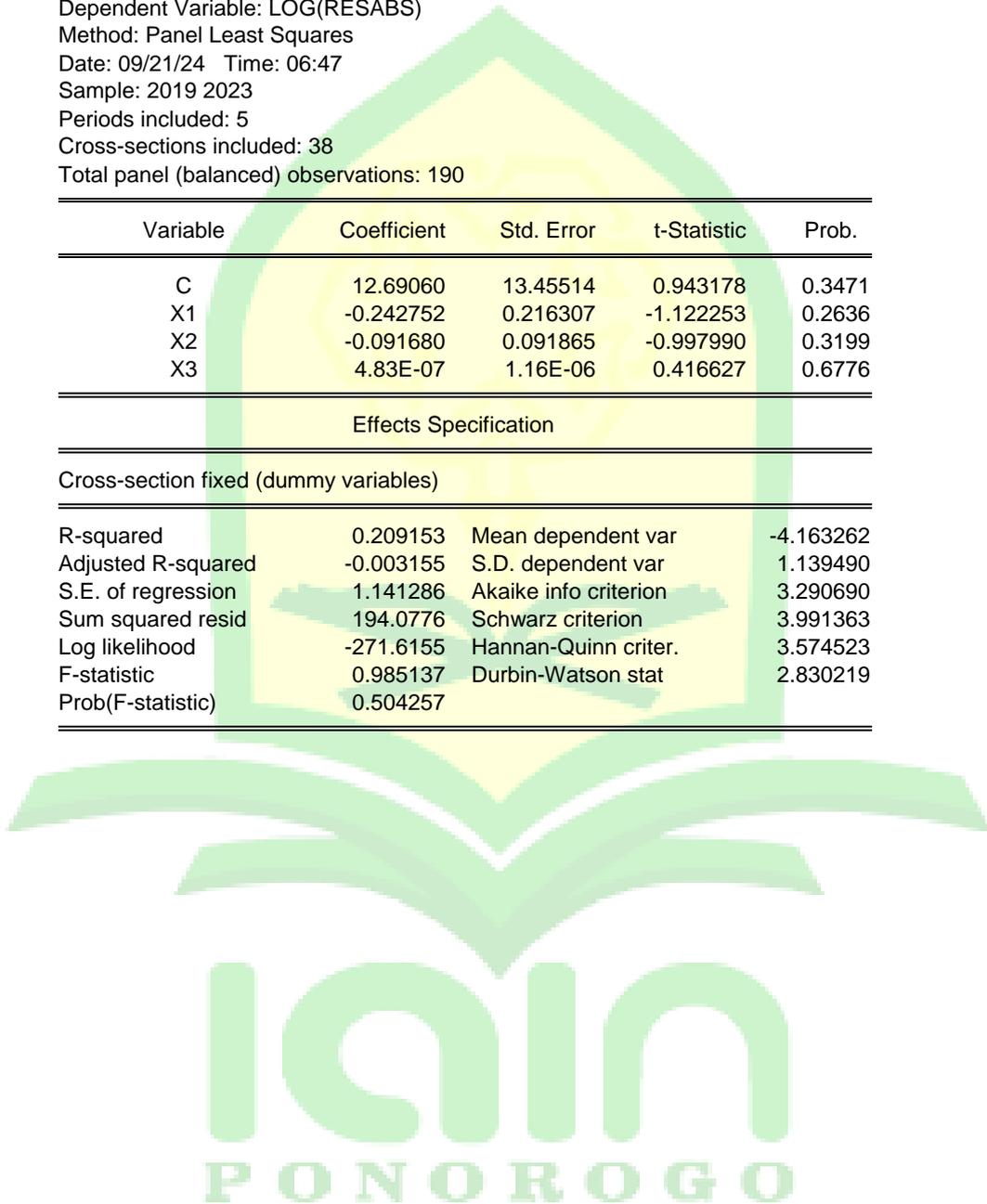
Dependent Variable: LOG(RESABS)  
Method: Panel Least Squares  
Date: 09/21/24 Time: 06:47  
Sample: 2019 2023  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 38  
Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.69060	13.45514	0.943178	0.3471
X1	-0.242752	0.216307	-1.122253	0.2636
X2	-0.091680	0.091865	-0.997990	0.3199
X3	4.83E-07	1.16E-06	0.416627	0.6776

### Effects Specification

#### Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.209153	Mean dependent var	-4.163262
Adjusted R-squared	-0.003155	S.D. dependent var	1.139490
S.E. of regression	1.141286	Akaike info criterion	3.290690
Sum squared resid	194.0776	Schwarz criterion	3.991363
Log likelihood	-271.6155	Hannan-Quinn criter.	3.574523
F-statistic	0.985137	Durbin-Watson stat	2.830219
Prob(F-statistic)	0.504257		



## RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fiyya Wahdatul Khusna
2. Tempat Tanggal Lahir : Pacitan, 02 November 2001
3. Alamat Rumah : Dsn. Klagen, Ds. Mantren, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan
4. HP : 082359457515
5. E-mail : fiyyafayya@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK Tunas Putra
  - b. SD Negeri Mantren
  - c. MTs Ma'arif 06 Mantren
  - d. MA Terpadu Hudatul Muna 2
2. Pendidikan Non-formal
  - a. Madrasah Diniyah Taufiqiyah Mantren
  - b. Madrasah Diniyah Hidayatul Muhtadi'aat